

TESIS

PELAKSANAAN PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (Studi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kemagisteran Dalam Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan

Oleh :

NIA MARISA

176010200111091



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2019

TESIS

**PELAKSANAAN PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH
KEPOLISIAN SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS
(STUDI DI KOTA MALANG, KABUPATEN MALANG DAN KOTA BATU)**

Oleh :
Nia Marisa
Nim : 176010200111091

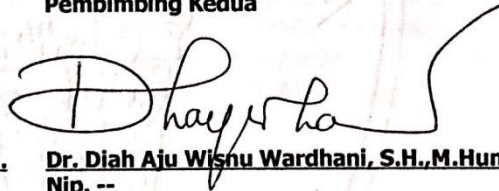
telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 22 Juli 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama



Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.
Nip. 197608151999031003

Pembimbing Kedua



Dr. Diah Aju Wisnu Wardhani, S.H., M.Hum.
Nip. --

Malang, 09 AUG 2019.

Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan



Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.
Nip. 197608151999031003

Ketua Program
Magister Kenotariatan



Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.
Nip. 195710211986011002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya laporan tesis ini.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil, sehingga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan arahan serta dukungan dalam pengerjaan tesis ini.
4. Ibu Dr. Diah Aju Wisnuardhani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dengan sabar dalam pengerjaan tesis ini.
5. Kedua Orangtua Papa Hari Subagiyo, S.H.,M.H., dan Mama Titik Poerwati, Ir.,M.T., yang sampai detik ini dan sampai kapanpun selalu memberikan doa serta dukungan yang tiada henti dalam perjalanan hidup Penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah S.W.T
6. Adik – adik Penulis, yaitu Raka Bagaswara dan Mas Rabbar Tigiyono.
7. Teman dan Sahabat ABYAZ 3C, yaitu Anissa Aulia, Ni Kadek Candika, Herlina Wulandari, Qariin Novalia dan Adinda Artha yang selalu memberikan dukungan sangat luar biasa, dan selalu siap sedia memberikan bantuan setiap Penulis melaksanakan beberapa tahap Ujian dalam menempuh Magister Kenotariatan. Penulis ucapkan banyak terima kasih semoga kita sukses kedepannya.
8. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2017 khususnya kelas C, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian.

9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin laporan tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan laporan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah S.W.T. mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2019.

Nia Marisa

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Persetujuan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Ringkasan.....	viii
<i>Summary</i>.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Teoritis	11
1.6. Definisi Operasional.....	15
1.7. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Tinjauan Umum tentang Notaris	19
2.2. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Terhadap Notaris Dan Majelis Pengawas Daerah	22
2.3. Tinjauan Umum tentang Majelis Kehormatan Notaris.....	30
2.4. Tinjauan Umum tentang Kepolisian sebagai Penyidik.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	41
3.3. Lokasi dan Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian.....	41
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4.1. Jenis Data.....	42
3.4.2. Sumber Data	43
3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	43
3.5.1. Populasi.....	43

3.5.2. Sampel dan Teknik Sampling	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data	45
3.6.1. Data Primer	45
3.6.2. Data Sekunder	46
3.7. Teknik Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN	48
4.1. Pelaksanaan Pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN.....	48
A. Prosedur Pemanggilan Notaris oleh Kepolisian dalam Proses Penyidikan.....	48
B. Pelaksanaan Pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 di Instansi Kepolisian Malang Raya.....	63
C. Faktor – Faktor yang Menjadi Hambatan Pelaksanaan Pemanggilan Notaris setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 di Kepolisian Malang Raya.....	76
D. Upaya Penyidik dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.....	78
4.2. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Penyidik	79
A. Proses Pemeriksaan Notaris yang dimohonkan oleh Penyidik untuk Memberi Keterangan dalam Proses Penyidikan oleh MKN Wilayah Jawa Timur	79
B. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Penyidik.....	86
C. Faktor – Faktor yang Menjadi Hambatan Pelaksanaan	

Kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Penyidik.....	95
D. Upaya yang telah Dilakukan Oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Penyidik.....	97
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2.1 Pemanggilan Notaris yang Berkaitan dengan Akta Minuta Oleh Kepolisian Malang Raya	65
Tabel 3.1 Data Pemanggilan Notaris dengan Persetujuan MKNW Jatim	68
Tabel 4.1 Perbedaan Kewenangan MKN dengan MPD.....	92
Tabel 5.1 Data Permohonan Pemeriksaan Notaris Oleh MKNW Jawa Timur	93
Tabel 5.2 Data Sidang MKNW Jawa Timur 2018	94

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1.1 Prosedur Pemanggilan Notaris setelah Berlakunya Permenkumham Nomor 7/2016	52
Bagan 2.1 Prosedur Pemeriksaan Notaris Oleh MKNW	81

RINGKASAN

Munculnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUDN Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur kembali adanya persetujuan dalam pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta yang mana sebelumnya mengenai persetujuan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, dengan adanya dua aturan yang berbeda tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan pemanggilan terhadap Notaris. Apakah setelah berlakunya Peraturan Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 66 ayat (1) UUDN Penyidik dalam melakukan pemanggilan kepada Notaris terkait dugaan adanya sengketa atas Akta Otentik yang dibuatnya berpedoman pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yang mewajibkan dengan persetujuan MKN, atau berpedoman pada Putusan MK yang tidak menghendaki adanya persetujuan pada pemanggilan yang melibatkan Notaris.

Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Malang Raya. Data diperoleh melalui Data Primer berupa hasil wawancara dan Pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh Penulis. Populasi menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah *Deskriptif Kualitatif*.

Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan *Pertama* yaitu Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Oleh Kepolisian dalam Proses Penyidikan setelah Pemberlakuan Permenkumham dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 di Malang Raya bahwa setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Kepolisian Malang Raya telah berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUDN dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun terhadap Penegakan Hukumnya sendiri ketentuan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. *Kedua* yaitu Pelaksanaan Kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur terkait kewenangannya memberikan persetujuan terhadap permohonan pemanggilan Notaris yang dilakukan oleh Penyidik, telah dilaksanakan dari awal tahun 2017, mayoritas Notaris yang diperiksa adalah terkait dugaan pemalsuan bukti-bukti otentik. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut MKN Wilayah Jawa Timur masih menemukan beberapa kendala atau hambatan sehingga pelaksanaan kewenangan MKN Wilayah kurang dapat dilaksanakan dengan baik, salah satu faktornya adalah dari Notaris itu sendiri.

SUMMARY

The effectuation of the Regulation of Law and Human Rights Minister Number 7 of 2016 as implementing regulation of the provision of Article 66 Paragraph (1) of Act concerning Notarial Post Number 2 of 2014, re-regulating the existence of agreement regarding summoning a notary in relation to the original of deed, has previously been cancelled by Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012. Existence of two different decisions leads to confusion and uncertainty in law for police as law enforcers with binding authority to summon a notary. Whether the effectuation of Regulation concerning Law and Human Rights Number 7 of 2016 as implementing regulation for Article 66 Paragraph (1) of Act concerning Notarial Post in summoning a notary over authentic deed-related conflict refers to the Regulation of Law and Human Rights Minister Number 7 of 2016 that requires the approval of the Honorary Notarial Board or it refers to the Constitutional Court Decision that requires no approval for summoning the notary is questioned.

This research was conducted in Police Department of Malang, employing empirical juridical method. The primary data was obtained from interviews and direct observation, and the samples were taken based on purposive sampling technique, followed by an analysis based on qualitative-descriptive analysis.

The research result reveals that, firstly, the subpoena of the notary performed by the police for enquiry following the effectuation of Regulation of Law and Human Rights Minister Number 7 of 2016 of Malang has referred to the provision of Article 66 Paragraph (1) of Act concerning Notarial Post and Regulation of Law and Human Rights Minister Number 7 of 2016 as the implementing regulation. However, in terms of the law enforcement per se, this provision has not been maximally implemented due to several factors affecting the law enforcement. Secondly, the implementation of authority of the honorary notarial board in East Java in terms of approval for the subpoena has been performed since 2017. Most notaries inquired were involved in falsification of authentic evidence. Performing the authority is not without hindrance, one of which comes from notaries, and this situation has hampered the full implementation for the board.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Munculnya profesi Notaris di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dalam lingkup masyarakat, diantara kebutuhan masyarakat tersebut terdapat beberapa kebutuhan yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum secara keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara para pihak yang terlibat didalamnya. Hubungan hukum secara keperdataan yang dibentuk oleh masyarakat dapat melalui suatu perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang bersangkutan, untuk lebih menjamin adanya suatu kepastian hukum diantara para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian, maka seorang tersebut membutuhkan Notaris sebagai Pejabat yang dapat membuat suatu alat bukti yang bersifat otentik.

Di era modern kebutuhan masyarakat terhadap jasa Notaris terus meningkat, dimana Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembuatan akta otentik. Mengingat akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap hubungan hukum dan kehidupan masyarakat. Hubungan yang dimaksud mencakup hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan hingga kegiatan sosial. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum pembuat akta otentik diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN , yaitu di dalam Pasal 1 yang berbunyi :

Pasal 1,

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Mengenai bentuk dan jenis akta otentik yang menjadi kewenangan notaris diatur lebih lanjut didalam Pasal 15 UUJN, yang berbunyi :

Pasal 15,

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan Kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Notaris sebagai Pejabat Umum, diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang diwakili oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun walaupun diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada dasarnya notaris merupakan Pejabat Umum yang memperoleh wewenangnya secara atribusi,¹ karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) itu sendiri. Jadi, wewenang Notaris bukan diperoleh atau berasal dari lembaga lain, seperti misalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wewenang atribusi sendiri memiliki pengertian yaitu, pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Seperti halnya wewenang yang dimiliki oleh Notaris adalah berasal dari Undang – Undang Jabatan Notaris itu sendiri. Beberapa kewenangan yang diberikan kepada Notaris, kewenangan umum yang merupakan sebuah karakteristik dari seorang Notaris yang adalah pembuatan Akta Otentik.

Akta otentik sendiri memiliki pengertian yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yang berbunyi :

¹ Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, ***Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah***, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018. Hlm.6

“suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang – Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, merupakan sebuah dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna dalam hal ini adalah hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Akta Otentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum negara sehingga legalitasnya dapat dipastikan , ditambah lagi bahwa seorang pejabat umum negara tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris serta untuk menghadapi perkembangan perekonomian global yang semakin kompleks, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait *Ease of Doing Business* (EODB)² di Indonesia. Maka kedepannya akan mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan Notaris sangat besar, karena masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan hukum yang diberikan oleh Notaris dapat benar-benar menjamin kepastian hukum serta dapat dipertanggung jawabkan kepada siapapun termasuk dihadapan hukum. Oleh karenanya sangat dibutuhkan pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris, selain itu terkait pentingnya dan kekuatan sempurna sebuah dokumen negara yang dihasilkan oleh Notaris, dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang – Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris, agar sebuah dokumen yang dibuat tersebut dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum. Pengawasan dan pembinaan Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang mana ketentuan tersebut diatur dalam UUJN baik sebelum perubahan yaitu Nomor 30 Tahun 2004 dan setelah perubahan yaitu Nomor 2 Tahun 2014 yaitu dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi :

² Indeks Kemudahan Berbisnis

“Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.”

Majelis Pengawas Notaris (MPN) sendiri, berdasarkan Pasal 68 UUJN terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat

Berdasarkan pembagiannya tersebut, Majelis Pengawas mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing. Dibalik peran Notaris yang sangat penting dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, Keberadaan Majelis Pengawas sebagai badan yang mempunyai kewenangan melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris mempunyai peran yang penting. Pembinaan dalam hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya dan hasil yang lebih baik terhadap peningkatan pelaksanaan jabatan Notaris, sedangkan pengawasan merupakan pengambilan tindakan yang dapat mendukung hasil. Baik pembinaan maupun pengawasan perlu dilakukan karena jabatan Notaris rentan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan dalam UUJN. Terkait pelanggaran baik yang sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh Notaris, apabila Akta Otentik yang dibuatnya dapat menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan dengan adanya Akta Otentik tersebut dapat melaporkan kepada Pihak Kepolisian, bersumber dari laporan tersebut Pihak Kepolisian menindaklanjuti dengan membuat surat panggilan untuk melakukan pemanggilan kepada Notaris yang bersangkutan menjalani proses penyidikan. Seperti halnya profesi Kedokteran ketika diminta oleh pihak Kepolisian untuk datang dalam proses penyidikan, pihak Kepolisian harus lebih dulu meminta izin kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hal tersebut juga berlaku untuk profesi Notaris. Sebelum UUJN mengalami perubahan, yaitu UUJN Nomor 30 Tahun 2004, dalam Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa : “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang

memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” Dapat dikatakan bahwa pihak Kepolisian pun untuk memanggil Notaris baik sebagai saksi maupun turut tergugat, UUJN sebelum perubahan yaitu Nomor 30 Tahun 2004 menghendaki adanya persetujuan terlebih dahulu dari MPD hal itu dimaksudkan sebagai bentuk untuk melindungi profesi Notaris seperti minuta akta dan sebagainya, UUJN menghendaki adanya kewajiban mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MPD apabila pihak penyidik akan melakukan pemanggilan kepada Notaris, persetujuan tersebut dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak terganggu karena sering diminta untuk hadir dalam penyidikan atau proses peradilan.

Namun setelah ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut dilaksanakan, bahwa setiap pemanggilan Notaris terkait minuta akta harus berdasar persetujuan MPD, Mahkamah Konstitusi menilai hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Melalui putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, MK mengabulkan permohonan pengujian UUJN Nomor 30 Tahun 2004, yaitu “Menyatakan Frasa dengan “Dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut :³

1. Menimbang bahwa pemanggilan Notaris, yang mana penyidik Kepolisian terlebih dahulu harus meminta izin kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa Notaris dalam perkara pidana, menurutnya ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip “Persamaan Kedudukan di dalam Hukum” bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Menimbang bahwa proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan;
3. Menurut Mahkamah perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan Prinsip Independensi dalam proses peradilan. (*"justice delayed justice denied"*⁴).

Akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada tahun 2013 pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Kepolisian tidak perlu mendapatkan ijin terlebih dahulu dari MPD.

Seiring perkembangan waktu, beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 mengalami perubahan setelah diterbitkannya Undang – Undang Jabatan Notaris yang baru yaitu Nomor 2 Tahun 2014. Namun yang menarik, ketentuan dalam pasal 66 UUJN (sebelum perubahan) terkait pemanggilan berdasarkan persetujuan MPD, dalam UUJN yang baru ketentuan tersebut tidak dihilangkan melainkan diganti “berdasarkan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” (yang selanjutnya disebut MKN) hal tersebut

⁴ Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak

dituangkan dalam Bab VIII tentang Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Dimana dalam Pasal 66 UUJN terbaru ini ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah serta ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4). Perubahan UUJN tersebut tetap mengisyaratkan adanya "Persetujuan" dalam pemanggilan Notaris, walaupun sebelumnya pemberian persetujuan tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tidak membuat UUJN (setelah perubahan) Nomor 2 Tahun 2014 menghapuskan ketentuan Pasal 66, ketentuan atas pemberian persetujuan dalam pemanggilan Notaris masih dicantumkan, hanya saja kewenangan tersebut dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Sedangkan apabila melihat pertimbangan hukum alasan MK menyetujui membatalkan frasa dalam Pasal 66 UUJN "dengan Persetujuan MPD" alasan tersebut lebih mempermasalahkan terhadap adanya "persetujuan" bukan kepada "lembaga atau badan yang memberikan persetujuan". Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum MK yang menyatakan bahwa :

1. Frasa "dengan persetujuan MPD" bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 28D, yaitu semua warga Indonesia sama dihadapan hukum;
2. Frasa "dengan persetujuan MPD" bertentangan dengan Independensi Peradilan.

Dapat dikatakan bahwa UUJN Nomor 2 Tahun 2014 ini tidak mengakomodir Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012.

Setelah 2 (dua) tahun UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dijalankan, Menteri Hukum dan HAM mempertimbangkan bahwa perlu dikeluarkannya peraturan pelaksana dari Pasal 66 ayat (1) agar ketentuan "dengan Persetujuan MKN" terkait pemanggilan Notaris dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi Notaris. Maka dari itu, pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Dengan diberlakukannya Permenkumham Nomor 7 Tahun

2016 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 66 ayat (1) UUDN, menurut Penulis terdapat inkonsistensi norma, yaitu UUDN dan Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan pemanggilan Notaris harus berdasarkan persetujuan. Yang perlu diingat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu : 1) Kekuatan Mengikat, 2) Kekuatan Pembuktian, dan 3) Kekuatan Eksekutorial. Dalam sebuah jawaban atas pertanyaan *pers*, seorang Menteri mengatakan bahwa benar hakim MK adalah *legislator* dan putusannya berlaku sebagai Undang – Undang.⁵ Oleh karena itu, dengan adanya 2 (dua) ketentuan yang berbeda mengatur mengenai Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian hukum bagi pihak Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan pemanggilan terhadap Notaris.

Kepolisian dalam hal ini sebagai Penyidik mempunyai kewenangan dalam hal melakukan pemanggilan, pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan selain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat.⁶ Adapun yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya.⁷ Dengan demikian, tujuan dari pemanggilan sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Kewenangan penyidik untuk melakukan pemanggilan tersebut juga berlaku untuk Notaris, untuk menghadirkan Notaris baik sebagai saksi maupun turut tergugat ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Oleh karena terdapat 2 (dua) ketentuan yang berbeda tersebut diatas,

⁵ Maruarar Siahaan, ***Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 214-216.

⁶ M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

⁷ Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penulis perlu melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui apakah sebagai penyidik setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Penyidik dalam melakukan pemanggilan kepada Notaris baik sebagai saksi maupun turut tergugat terkait dugaan adanya sengketa atas Akta Otentik yang dibuatnya, berpedoman pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yang mewajibkan dengan persetujuan MKN, atau berpedoman pada Putusan MK yang tidak menghendaki adanya persetujuan pada pemanggilan yang melibatkan Notaris.

Berdasarkan uraian latar Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka dalam penelitian hukum ini Penulis mengangkat judul : **"PELAKSANAAN PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016"** dan setelah melakukan pra-survey untuk mendapatkan data awal mengenai adanya pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Penulis memutuskan untuk melakukan studi perbandingan di 3 (tiga) wilayah yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

1.2. RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1. Bagaimana Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016?
- 1.2.2. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Penyidik?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

- 1.3.1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Oleh Kepolisian setelah

Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016.

- 1.3.2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis. Pelaksanaan Kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Penyidik.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan pada umumnya. Melalui penelitian ini maka diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata (*law in action*) sehingga untuk masa yang akan datang tercipta situasi hukum yang lebih kondusif.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris

Diharapkan Penelitian ini bisa menjadi pengetahuan bagi Notaris apabila dilakukan pemanggilan terhadap dirinya terkait Minuta Akta oleh Penyidik, prosedur yang seperti apa yang seharusnya mereka dapatkan, apakah perlu persetujuan atau tidak dalam pemanggilan yang melibatkan Notaris.

b. Bagi Kepolisian

Diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan terkait Peraturan mana yang seharusnya menjadi pedoman Polisi sebagai penyidik dalam hal pemanggilan terhadap Notaris setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016.

1.5. KERANGKA TEORITIS

1.5.1. Teori Penegakan Hukum

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa :

“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.”

Hal tersebut dimaksudkan bahwa suatu hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya.⁸

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang selaras dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum, Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikanya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Suatu studi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa agar suatu penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, beberapa faktor di bawah ini harus difungsikan dengan baik dan benar, yaitu sebagai berikut:⁹

- a) Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum

⁸ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 41

⁹ Ibid, hlm. 45

- b) Sikap yang lugas (*zakelijik*) dari para penegak hukum,
- c) Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir,
- d) Penerapan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat,
- e) Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Lebih tegasnya lagi, masih menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memperngaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :¹⁰

- a) Faktor hukumnya sendiri (termasuk faktor undang-undang)
- b) Faktor penegak hukum;
- c) Faktor sarana prasana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat yakni masyarakat hukum tersebut diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakin sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang harus diperbaiki jika menghendaki adanya suatu penegakan hukum yang baik dan benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :¹¹

- a) Faktor Hukum

Pada praktiknya penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan

¹⁰ Ibid, hlm. 46

¹¹ Soerjono Soekanto, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau suatu tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tersebut atau suatu tindakan tersebut tidak bertentangan dengan segala sesuatu yang telah diatur di dalam hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, maupun *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, apabila sebuah peraturan sudah baik, tetapi kualitas dari petugas kurang baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah. Oleh karenanya, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yaitu dapat berupa pendidikan serta pengetahuan dari penegak hukum itu sendiri dan pelaksanaannya. Sebagai contoh pendidikan yang diterima Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Polisi mengalami hambatan untuk mencapai tujuannya. Di beberapa keadaan secara teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari bahwa tugas yang harus diemban oleh Polisi begitu luas dan banyak.

d) **Faktor Masyarakat**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya tolak ukur kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

1.5.2. Aparat Penegak Hukum

a) Kejaksaan

Kedudukan kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman mempunyai posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Salah satu tugas pokok Kejaksaan adalah melakukan penuntutan sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil penyidikan.¹²

b) Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, tempat para hakim menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

"kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum RI."¹³

c) Advokat

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal

¹² https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=4193&bc=

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d) Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHP diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 KUHP.

Sebagai bentuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, lembaga kepolisian mempunyai tahapan penyidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pada tahap penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui adanya tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

1.6. DEFINISI OPERASIONAL

- 1.6.1. **Pemanggilan** adalah tindakan Penyidik untuk menghadirkan saksi/tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi untuk membuat terang tindak pidana tersebut.
- 1.6.2. **Notaris** adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu pertauran umum atau

oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimoan aktanya dan memberika *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya spanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

1.6.3. **Kepolisian Republik Indonesia**

adalah hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana kepolisian mempunyai tugas untuk menjamin keamanan dan keteriban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

1.6.4. **Majelis Kehormatan Notaris** adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.¹⁵

1.7. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam mengatasi tindakan plagiarisme, maka sudah sepantasnya di setiap suatu penulisan ilmiah wajib mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkitan dengan penelitian yang baru akan diteliti. Adapun dalam pembuatan tesis ini, setelah dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian lain, Penulis menemukan beberapa penelitian ilmiah yang memiliki topik bahasan yang cukup dekat dengan topik bahasan tesis ini, yaitu akan dijelaskan dalam bentuk kebaruannya melalui tabel sebagai berikut :

¹⁴ Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	JENIS PENELITIAN/UNIVERSITAS/ TAHUN/PENULIS/JUDUL	PERBEDAAN
1	Tesis/Universitas Brawijaya/2017/Sugandi/ Kedudukan Hak Ingkar Dan Pemanggilan Notaris Pasca Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Pada Proses Peradilan Pidana.	Bentuk kebaruan penelitian Penulis dengan penelelitian terdahulu adalah : - Penelitian Terdahulu adalah penelitian Normatif, sedangkan penelitian penulis adalah penelitian empiris. - Pembahasan penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai kedudukan Hak Ingkar yang dirasa kabur pengaturannya, serta setelah pemberlakuan Permenkumham 7/2016 apa upaya yang dapat dilakukan apabila MKN menolak memberikan persetujuan kepada penyidik terkait pemanggilan Notaris.
2	Tesis/Universitas Brawijaya/2017/Chaterina Istarina/ Efektifitas Penerapan Pasal 18 Peraturan Menteri	Dalam penelitian terdahulu, membahas mengenai substansi pasal 18 ayat 1, bagaimana perlindungan hukum yang

	Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Melindungi Profesi Notaris	diberikan oleh MKN setelah memberikan persetujuan kepada Notaris terkait pemanggilan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam persidangan. Dalam penelitian ini mempermasalahkan mengenai tanggung jawab MKN setelah memberikan persetujuan, harusnya MKN mendampingi Notaris untuk membantu memberikan pembelaan dipersidangan.
3	Tesis/2017/Universitas Lampung/Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012	Dalam penelitian hukum ini membahas mengenai siapa yang berwenang melakukan pengawasan serta pembinaan kepada Notaris setelah adanya Putusan MK, serta tugas dan fungsi MKN setelah putusan MK. Jadi dalam penelitian ini lebih membahas mengenai wewenang dari MPD dan MKN setelah adanya putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Notaris

2.1.1. Kewenangan, Kewajiban serta Larangan Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang – Undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:¹⁷
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagai mana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

¹⁶ Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris

¹⁷ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris

g) Membuat akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Selanjutnya, disamping memiliki kewenangan yang telah disebutkan diatas. Notaris memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yang mana kewajiban tersebut disebutkan dalam Pasal 16 UUJN, yaitu:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a) Bertindak amanah, jujur seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protocol Notaris.
 - c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari para penghadap pada minuta akta.
 - d) Mengeluarkan gross akta, salinan akta, dan kutipan akta berdasarkan minuta akta.
 - e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang – Undang menentukan lain.
 - g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul buku setiap buku.
 - h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterima surat berharga.

- i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - j) Mengirimkan Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan.
 - l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
 - n) Menerima magang calon Notaris.
2. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta *in originali*.¹⁸

Selain kewenangan dan kewajiban, dalam UUJN pula mengatur mengenai beberapa larangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu sebagai berikut :

- 1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

¹⁸ **Akta in originali** adalah asli akta yang diberikan langsung kepada yang berkepentingan dalam akta

5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan martabat jabatan Notaris.

2.2. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Terhadap Notaris dan Majelis Pengawas Daerah

2.2.1. Pengawasan Terhadap Notaris

Sebelum berlakunya Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur segala sesuatu mengenai Notaris, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada masa itu,

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004.¹⁹

Pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Badan Peradilan, hal tersebut bisa terjadi karena dahulu Notaris diangkat oleh

¹⁹ Habib Adjie, op. cit. Hlm. 1

Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), yang mana pada masa itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman. Namun setelah adanya perubahan terhadap Undang – Undang Dasar 1945 dengan amandemen tersebut merubah pula Kekuasaan Kehakiman. Perubahan tersebut dipertegas dengan dibuatnya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi, dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman.²⁰ Selain itu, ditahun yang sama, tahun 2004 dibuat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.²¹

Sejak terdapat pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri) tidak tepat lagi apabila pengawasannya tetap dilaksanakan oleh Badan Peradilan, yang mana Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan terhadap Badan Peradilan. Setelah berlakunya Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN), hal tersebut sekaligus mencabut ketentuan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pengawasan terhadap notaris, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 91 angka 4 (empat) UUJN, yang berbunyi:

“Pasal 54 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4397.”

²⁰ Ibid., hlm. 2

²¹ Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai ***Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.***

Oleh karena itu, dengan berlakunya UUJN Badan Peradilan tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada Notaris. Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris saat ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membentuk Majelis Pengawas Notaris merupakan bentuk pendelegasian atributif oleh UUJN, Dengan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris, diharapkan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat terhadap akta otentik.

Majelis Pengawas Notaris dibentuk dengan jumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :²²

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3

Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 68, bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat

Pembagian tersebut sesuai dengan wilayah kerja dalam melaksanakan kewenangannya, yang mana Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota negara.

²² Pasal 67 ayat (3) Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2013

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, setidaknya dilakukan oleh anggota Majelis Pengawas yang di dalamnya terdapat unsur Notaris sehingga bisa lebih memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal yang artinya dilakukan oleh sesama profesi Notaris yang memahami dunia Notaris luar dalam, sedangkan unsur lainnya yaitu pemerintah dan masyarakat merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik. Perpaduan unsur tersebut diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan diharapkan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN, karena terdapat pengawasan yang dilakukan secara internal dan eksternal.²³

2.2.2. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut MPD, merupakan bagian dari Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk dan berkedudukan di Kota atau Kabupaten. Wewenang MPD diatur dalam

1. Undang – Undang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004; dan
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

²³ Habib Adjie, loc. Cit. Hlm. 3

Pasal 70 UUJN mengatur mengenai wewenang yang diberikan kepada MPD, yaitu :²⁴

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang – Undang ini; dan
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sedangkan kewajiban MPD yang diatur dalam Pasal 71 UUJN, adalah sebagai berikut :

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
-

2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah yang selanjutnya disebut MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut MPP, dan Organisasi Notaris;
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Selain dalam UUJN wewenang MPD pun diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), yang menegaskan bahwa kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua atau salah anggota yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan tersebut berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai :²⁵

1. Memberikan persetujuan cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan Notaris pengganti;
3. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat itu serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

²⁵ Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004

4. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang – undang;
5. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
6. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan:²⁶

1. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang prokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.
2. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang meninggal dunia.
3. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan.
4. Menyerahkan foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
5. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Kewenangan MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10

²⁶ Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004

Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71 UUJN, Pasal 12 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu:

1. Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti.
2. Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh MPD atas laporan yang disampaikan kepada MPD.
3. Mencatat persetujuan cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti.
4. Menandatangani dan memberi paraf buku daftar akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukkan surat di bawah tangan.
5. Menerima dan menatausahakan berita acara penyerahan protokol:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - b. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemeberian persetujuan cuti.

Sebelum adanya Perubahan UUJN, yaitu UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Majelis Pengawas Daerah (MPD) selain kewenangan dan kewajiban yang telah disebutkan diatas MPD diberikan kewenangan terkait Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yaitu :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Namun, setelah adanya perubahan pada UUJN, yaitu UUJN Nomor 2 Tahun 2014 kewenangan MPD terhadap pemberian persetujuan terhadap pemanggilan Minuta Akta atau Protokol Notaris dan Pemanggilan Notaris dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

2.3. Tinjauan Umum tentang Majelis Kehormatan Notaris

2.3.1. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan foto copy minuta akta dan pemanggilan yang melibatkan Notaris atas permohonan untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²⁷

Kemunculan Majelis Kehormatan Notaris berasal dari UUJN Nomor 2 Tahun 2014, yaitu dalam Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris....”

Yang mana sebelumnya dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004, hal tersebut menjadi kewenangan dari MPD. Oleh karenanya

²⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016.

munculnya MKN berasal dari perintah UUJN, agar dapat dilaksanakannya kewenangan MKN tersebut maka Menteri mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

2.3.2. Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris

Seperti halnya MPD, MKN juga dibentuk dan bekedudukan di masing-masing wilayah yang terdiri dari :

1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat

MKN Pusat dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Ibukota, MKN berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur :

- a) Pemerintah
- b) Notaris
- c) Ahli atau akademisi

MKN Pusat beranggotakan 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas :

- a) 1 (satu) orang Ketua
- b) 1 (satu) orang Wakil Ketua
- c) 5 (lima) orang anggota

Ketua dan wakil ketua MKN Pusat harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota MKN Pusat yang dilakukan secara musyawarah. Apabila pemilihan secara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua MKN Pusat dilakukan dengan cara pemungutan suara. MKN Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap MKN Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya dan dalam menjalankan tugasnya tersebut MKN Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN Wilayah.²⁸

²⁸ Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berdaarkan persetujuan Ketua Majelis Pusat.

2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Sama seperti halnya MKN Pusat, MKN Wilayah dibentuk berdasarkan unsur-unsur berikut ini :

- a) Pemerintah
- b) Notaris
- c) Ahli atau Akademisi

MKN Wilayah beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

- a) 1 (orang) Ketua
- b) 1 (orang) Wakil Ketua
- c) 5 (lima) orang anggota

Ketua dan Wakil Ketua MKN Wilayah harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota MKN Wilayah yang dilakukan secara musyawarah. Majelis Kehormatan Wilayah memiliki tugas, yaitu :

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan penyidik, penuntut umum dan hakim.
- b) Memberikan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan

MKN Wilayah dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a) Menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatan.
- b) Memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

2.4. Tinjauan Umum tentang Kepolisian sebagai Penyidik

Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.²⁹

2.4.1. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan suatu proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana adalah dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu, untuk menentukan apakah perbuatan yang diduga tersebut memenuhi unsur perbuatan tindak pidana atau tidak. Hal tersebut dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.³⁰ Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai Penyelidikan dan Penyidikan :

a. Penyelidikan

Pengertian Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, yaitu:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sedangkan yang melakukan Penyelidikan, disebut Penyidik yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu:

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Tugas dan Wewenang Penyidik disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP, yaitu :

²⁹ Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumnus, Bandung, 2007, hlm. 56

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan;
 - b) Mencari keterangan dan alat bukti;
 - c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggung jawab.
2. Kewenangan Penyelidik atas perintah Penyidik :
 - a) Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Fungsi Penyelidikan hanya sebagai untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi, selanjutnya mengenai kelanjutan dari proses penyelidikan, seperti membuat berita acara serta laporannya merupakan dasar permulaan proses penyidikan.

Kegiatan Penyelidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk :³¹

- a) Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b) Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c) Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Kegiatan yang dimaksud diatas, meliputi :³²

³¹ Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- a) Pengolahan TKP;
- b) Pengamatan (*observasi*);
- c) Wawancara (*interview*);
- d) Pembuntutan (*surveillance*);
- e) Penyamaran (*under cover*);
- f) Pelacakan (*tracking*);
- g) Penelitian dan analisis dokumen.

Sasaran penyelidikan meliputi :

- a) Orang;
- b) Benda atau barang;
- c) Tempat;
- d) Peristiwa/kejadian; dan
- e) Kegiatan.

b. Penyidikan

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, bahwa :

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Sedangkan Penyidikan, dalam Pasal 1 angka 2 adalah :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, yang karena kewajibannya mempunyai wewenang :³³

³² Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

³³ Pasal 7 KUHP

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didenger dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHP adalah Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b), yaitu Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Penyidik PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang – Undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Tujuan penyidikan itu sendiri adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mncapai maksud tersebut makan

penyidik akan mengumpulkan keterangan dengan fakta atau peristiwa tertentu.³⁴

Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana, kegiatan penyidikan dilakukan untuk membuat terang tindak pidana yang telah terjadi guna menemukan tersangkanya. Berikut keterangan-keterangan yang biasanya didapat dari sebuah proses penyidikan :³⁵

- 1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan
- 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan
- 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- 6) Mengapa tindak pidana tersebut dilakukan
- 7) Siapa pembuatnya.

c. Prosedur Penyidikan Oleh Kepolisian

Secara garis besar proses penyidikan dilakukan secara bertahap meliputi:

1) Penyelidikan

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Kegiatan penyelidikan meliputi :³⁶

- a) Pengolahan TKP
- b) Pengamatan
- c) Wawancara
- d) Pembuntutan

³⁴ M. Husein Harun. ***Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana***. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 56.

³⁵ Djoko Prakoso, ***Polri Sebagai Penyelidik Dalam Penegakan Hukum***, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 7

³⁶ Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- e) Prosedur PenPelacakan
- f) Penyamaran
- g) Penelitian dan analisis dokumen

2) Penindakan / Upaya Paksa

Setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi. Penindakan atau Upaya Paksa meliputi :³⁷

- a) Pemanggilan;
- b) Penangkapan;
- c) Penahanan;
- d) Penggeledahan;
- e) Penyitaan;
- f) Pemeriksaan Surat;

Pemanggilan dalam hal ini dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, Laporan hasil penyelidikan dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.³⁸

Surat pemanggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan, dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua. Apabila panggilan kedua tidak juga datang sesuai waktu yang

³⁷ Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

³⁸ Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

telah ditetapkan, maka penyidik menerbitkan surat perintah membawa.³⁹

3) Pemeriksaan

Kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu jelas.

a) Pemeriksaan terhadap saksi

Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.⁴⁰

b) Pemeriksaan terhadap ahli

Pemeriksaan terhadap ahli dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Penyidikan.⁴¹

c) Pemeriksaan terhadap tersangka

4) Penyelesaian Berkas Perkara

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

a) Pembuatan resume

b) Penyusunan berkas perkara

c) Penyerahan berkas perkara

³⁹ Pasal 27 ayat 3 dan ayat 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁴⁰ Pasal 64 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁴¹ Pasal 65 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, mendefinisikan metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidangnya.”⁴²

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumusan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴³ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan – kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴⁴ Metode penelitian juga merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. ⁴⁵ Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian, antara lain sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Jenis yang akan dilakukan oleh Peneliti adalah Penelitian Yuridis Empiris atau dapat disebut pula Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam pelaksanaannya di lapangan atau di masyarakat. Atau dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data dibutuhkan terkumpul

⁴² Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2014. Hlm. 5

⁴³ Cholid Narbuko dan Abu Achamdi, **Metodologi Penelitian**, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1

⁴⁴ Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm. 5

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126

kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.⁴⁶

Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Empiris karena hendak meneliti tentang Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016.

3.2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016.

3.3. Lokasi dan Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Menurut Nasution, lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang identik dengan adanya unsur pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat di observasi.

Penelitian tentang Pemanggilan Notaris Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016, akan dilaksanakan di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Penulis memilih Instansi Kepolisian, Notaris yang pernah dipanggil oleh Penyidik baik sebagai saksi maupun turut tergugat, sebagai lokasi penelitian dikarenakan instansi tersebut berkaitan dan memenuhi kriteria yang berkaitan dengan judul diatas.

3 (tiga) lokasi yang berbeda tersebut diatas, dimaksudkan sebagai pembanding bagaimana pelaksanaan pemanggilan notaris oleh kepolisian setelah berlakunya Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Jenis data Primer dan Jenis data Sekunder.

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

- 1) Penyidik Kepolisian
 - a) Kasat Reserse dan Kriminal Kota Malang
 - b) Kasat Reserse dan Kriminal Kabupaten Malang
 - c) Kasat Reserse dan Kriminal Kota Batu
- 2) Notaris yang pernah dilakukan pemanggilan oleh Penyidik di tahun 2018 baik sebagai saksi:
 - a) Notaris Kota Malang,
 - b) Notaris Kabupaten Malang
 - c) Notaris Kota Batu
- 3) Majelis Kehormatan Notaris
- 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Surabaya

3.4.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data – data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data penelitian dapat diperoleh dengan melakukan tinjauan pustaka seperti buku-buku imiah, hasil penelitian dan sebagainya. Dalam penelitian ini Penulis memperoleh melalui :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- 3) Jurnal Hukum;

- 4) Buku Literatur terkait;
- 5) *Ebook*;
- 6) Peraturan Perundang – Undangan Jabatan Notaris;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumber data dalam Penelitian ini, terdiri atas Sumber data Primer dan Sumber data Sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, diperoleh melalui penelitian langsung ke lapangan berupa wawancara dengan beberapa pihak yang telah ditentukan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan buku, literatur atau dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.5.1. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian harus ditetapkan dengan maksud agar penelitian yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai tujuan yang diharapkan dalam sebuah penelitian. Sugiyono, mendefinisikan populasi adalah sebagai berikut :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi (responden) dalam penelitian ini adalah

- 1) Polisi Kota Malang, Polisi Kabupaten Malang dan Polisi Kota Batu;
- 2) Notaris sebagai Saksi Yang Dipanggil Tidak Menggunakan Persetujuan MKNW;
- 3) Majelis Kehormatan Notaris.
- 4) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Surabaya

3.5.2. Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, Teknik Sampling merupakan teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.⁴⁷

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling*.⁴⁸ Alasan mengapa penulis menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria seperti yang penulis butuhkan. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* dengan melalui pertimbangan atau kriteria-kriteria yang memenuhi terhadap sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain penulis memilih sampel tersebut dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui atau mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan yang dikaji. Adapun sampel yang terpilih adalah :

- 1) Dari seluruh Kepolisian di Malang dan Batu, penulis mengambil sampel yaitu:
 - a) Kasat Reserse dan Kriminal Kota Malang
 - b) Kasat Reserse dan Kriminal Kabupaten Malang
 - c) Kasat Reserse dan Kriminal Kota Batu
- 2) Dari keseluruhan Notaris sebagai Saksi Yang Dipanggil Tidak Menggunakan Persetujuan MKNW, penulis mengambil sampel sebagai berikut :
 - a) 1 Notaris berkedudukan di Kota Malang
 - b) 1 Notaris berkedudukan di Kabupaten Malang
- 3) Majelis Kehormatan Notaris
- 4) Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

⁴⁷ Sugiyono, **Metode Penelitian**, Alfabeta, Jakarta, 2014, hlm. 116

⁴⁸ *Purposive Sampling* menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Data Primer

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang penting dalam berperan untuk kelancaran dan keberhasilan suatu penelitian. Untuk mendapatkan data yang tepat dan sesuai terhadap penelitian Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016, penulis melakukan melalui Wawancara Langsung dengan :

1. Kepolisian Malang Raya (dilaksanakan pada bulan April-Mei)
 - a. Penyidik Polresta Malang, Aiptu Tinggal Siswoyo, S.H.,M.H. Penyidik Polres Kabupaten Malang, Bpk. Rudi
 - b. Penyidik Polres Kota Batu, Brigadir Faris Tyas,S.H.
2. Notaris sebagai Saksi Yang Dipanggil Tidak Menggunakan Persetujuan MKNW, wawancara dengan Notaris berkedudukan di Kabupaten Malang dan Kota Malang yang tidak disebutkan identitasnya.
3. Majelis Kehormatan Notaris & Kantor Wilayah Menteri Hukum dan HAM Jawa Timur, Wawancara dengan Bapak. Jiwamulya Heri Puguh Putra, S.H. bagian Administrasi Hukum Umum serta bagian dari MKNW Jawa Timur. (dilaksanakan pada bulan April – Mei)

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan permasalahan atau isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan tujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan

mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁴⁹

3.6.2. Data Sekunder

Data sekunder mengenai Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016, menggunakan :

- 1) Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data mempunyai tujuan untuk mengorganisasikan data – data yang telah diperoleh, yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil penulis terjun ke lapangan. Setelah mendapatkan data tersebut, maka penulis akan mengelolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif.

Pemilihan metode ini dikarenakan penelitian ini ingin mempelajari masalah – masalah, fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di masyarakat dan membuat gambaran terhadap situasi yang ada. Setelah itu analisis data kualitatif adalah teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh

⁴⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum Cet. 6*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.⁵⁰

⁵⁰ Lexy J. Moleong, ***Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi***, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hlm. 248

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris di Instansi Kepolisian Malang Raya

A. Prosedur Pemanggilan Notaris oleh Kepolisian dalam Proses Penyidikan

Notaris sebagai Pejabat Umum mempunyai kewenangan dalam membuat atau mengeluarkan produk hukum berupa Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena sempurnanya kekuatan pembuktian suatu Akta Otentik, Notaris harus menjamin kebenaran atas akta otentik yang dibuatnya. Notaris harus memastikan telah melakukan kewajibannya dalam proses pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam UUJN, beberapa kewajiban mengenai akta otentik yang diatur di dalam UUJN seperti contohnya mengenai bentuk akta Notaris harus sesuai dengan Pasal 38 UUJN yang telah menentukan bentuk Akta Notaris, selain itu Notaris mempunyai kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang mana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 huruf m dan Pasal 40 UUJN serta Pasal 44 yang mengatur mengenai bahwa segera setelah akta dibacakan akta tersebut di tanda-tangani oleh para penghadap, para saksi dan juga Notaris yang bersangkutan, maka dari itu ada kewajiban penghadap hadir dalam pembuatan akta otentik, sesuai dengan awal akta yang menyebutkan bahwa "hadir dihadapan saya Notaris di....." apabila penghadap berhalangan hadir atau penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka harus disebutkan dengan jelas di dalam akta tersebut.

Notaris harus berhati-hati dalam setiap pembuatan akta otentik, Notaris harus menjamin apapun yang dituangkan di dalam akta adalah benar. Selain itu, Notaris harus memastikan segala surat atau keterangan pendukung dalam pembuatan akta merupakan surat atau

keterangan yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan, hal tersebut untuk menghindarkan Notaris dari permasalahan hukum yang bersangkutan dengan akta otentik yang dibuatnya. Namun, pada prakteknya masih banyak Notaris yang dipanggil oleh Pihak Kepolisian atas laporan yang diterima mengenai akta otentik yang dibuatnya. Kepolisian dalam hal ini bertindak sebagai Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan panggilan atau pemeriksaan terhadap siapapun yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana sesuai yang disebutkan dalam Pasal Pasal 1 angka 1 jucto Pasal 1 angka 2 KUHP. Menurut sistem hukum acara lama, "Penyidikan" merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberik wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.⁵¹ "Penyidikan" merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian, siapakah pembuatnya.⁵² Hal tersebut berlaku untuk siapapun yang diduga melakukan sebuah tindakan pidana, termasuk Notaris sekalipun.

Apabila Pihak Kepolisian menerima laporan atau pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta tersebut, maka pihak Kepolisian akan menindaklanjuti dengan melakukan Penyelidikan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan Notaris berdasarkan laporan tersebut merupakan sebuah tindakan pidana. Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan suatu proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana

⁵¹ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 6

⁵² Sudarto, "**Peranan Kejaksaan Dalam Penyidikan, Penuntut Dan Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sidang Pengadilan Negeri**", Majalah Publikasi, Nomor 1, Penerbit Yayasan Lembaga Research Dan Afiliasi Industri Universitas Diponegoro, Semarang, 1962, hlm. 7.

adalah dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu. Setelah dilakukan penyelidikan, dan diketahui bahwa adanya unsur tindak pidana yang dilakukan pada umumnya berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) berbunyi:⁵³

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Namun disatu sisi, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 memberikan ketentuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim baik untuk proses penyidikan maupun untuk proses peradilan dalam hal pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta harus berdasarkan Persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris, hal tersebut diatur didalam Pasal 66 ayat 1 (satu) UUJN, yang berbunyi:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam Penyimpanan Notaris.”

Ketentuan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 23 yang berbunyi:⁵⁴

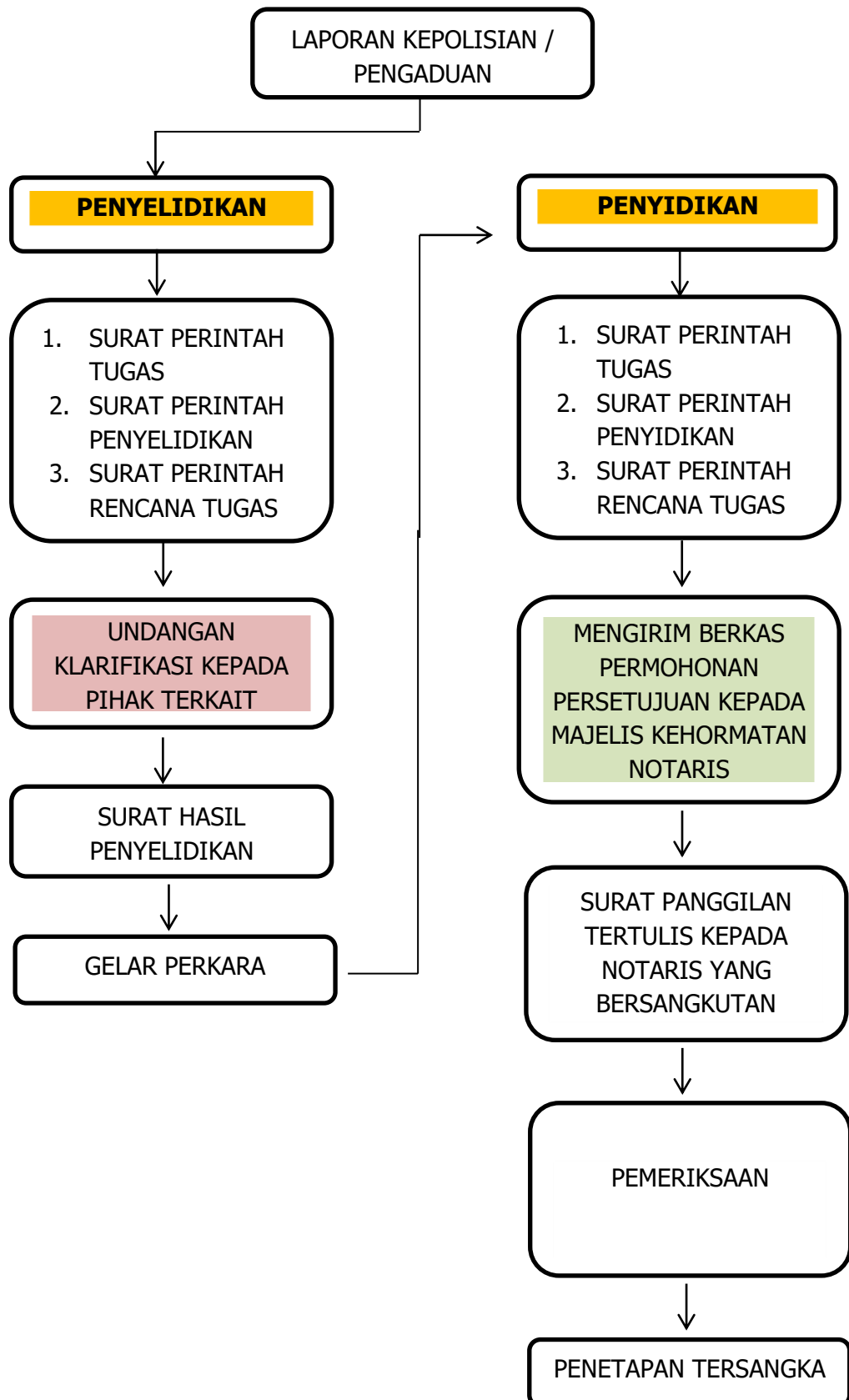
⁵³ Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁴ Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016

1. Permohonan persetujuan pengambilan Minuta Akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh Pihak Penyidik, Penuntut Umum, atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
2. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
3. Permohonan harus memuat paling sedikit: a. Nama Notaris; b. Alamat Kantor Notaris; c. Nomor Akta dan/atau Surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris; dan d. Pokok perkara yang disangkakan.
4. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap MKN Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jarwoto selaku Penyidik Polres Kota Malang, bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta untuk keperluan Penyidikan tidak membutuhkan persetujuan atau ijin siapapun yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sehingga Penyidik dapat langsung membuat surat panggilan untuk Notaris yang bersangkutan tanpa seijin siapapun. Namun setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana Pasal 66 UUJN, Pemanggilan yang melibatkan Notaris harus berdasarkan persetujuan MKN, berikut prosedur pemanggilan Notaris oleh Kepolisian untuk kepentingan Penyidikan setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

Bagan 1.1
Prosedur Pemanggilan Notaris setelah Berlakunya
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016



Keterangan :



Undangan Klarifikasi sifatnya adalah wawancara klarifikasi bukan bentuk pemanggilan sehingga terhadap pihak yang diundang tersebut mempunyai hak untuk datang atau tidak.



apabila Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk melakukan panggilan terhadap Notaris yang bersangkutan, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan surat panggilan tertulis Penyidik kepada Notaris untuk melakukan proses penyidikan, namun apabila Majelis Kehormatan Notaris menolak/tidak memberikan persetujuan dengan alasan tertentu, maka Penyidik tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap Notaris tersebut.

Berdasarkan data diatas, bahwa terdapat 4 (empat) tahapan dalam Penyidikan, yaitu Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Berkas Perkara. Pada tahapan Penyidikan yang pertama adalah Penyelidikan, pengertian penyelidikan diatur didalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang berbunyi :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP diatas, penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana tau bukan pelanggaran terhadap hukum

pidana.⁵⁵ Oleh karenanya sangat jelas bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas kepada aparaturnegara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan kepolisian atau pengaduan.⁵⁶

Dengan kata lain, penyelidikan dilakukan adalah atas dasar adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, apabila laporan atau pengaduan tersebut ditujukan kepada Notaris, pada umumnya laporan atau pengaduan tersebut berasal dari pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya akta Notaris tersebut.

Laporan atau Pengaduan itu sendiri disebutkan di dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP mengenai pengertian Laporan, menyebutkan :

"Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana."

Sedangkan pengertian Pengaduan disebutkan didalam Pasal 1 angka 25 KUHAP, yaitu :

"Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan."

Dua pengertian di atas sama-sama menyampaikan informasi berdasarkan hak-hak hukum kepada aparaturnegara yang berwenang. Selanjutnya dalam hal laporan, harapan dari pemberi informasi (pelapor) tidak disertai dengan sebuah permintaan untuk dilakukan tindakan hukum secara kuat, tetapi ada nilai-nilai yang sebenarnya hampir sama, bahwa perkara hukum itu juga harus ada tindakan atau proses hukumnya. Sedangkan dalam pengaduan, pengadu mempunyai kekuatan dan hak-hak untuk mengajukan permintaan secara jelas kepada paratur negara penegak hukum agar ada tindakan hukum atas

⁵⁵ Hartono, ***Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 19

⁵⁶ Ibid., hlm. 20

perkara itu.⁵⁷ Selain itu, perbedaan Laporan dengan Pengaduan adalah terletak pada jenis "hukum materiil" atau "jenis kejahatan" tindak pidana yang diberitahukan. Pada Laporan, pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedang pada pengaduan, merupakan pemberitahuan seorang kepada pejabat yang berwenang tentang "tindak pidana duan" atau *klacht delik* yang menimbulkan kerugian kepadanya.⁵⁸ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Bapak Jarwoto (sebagai Penyidik Polres Kota Malang), Bapak Rudi (KBO Polres Kabupaten Malang) dan Bapak Brigadir Faris Tyas (sebagai Penyidik Pembantu Pidana Umum Polres Kota Batu) bahwa sebagian besar penyelidikan yang dilakukan kepada Notaris atas dasar adanya Pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya akta Notaris itu, dan pengadu mempunyai maksud dan tujuan melakukan pengaduan tersebut untuk mengajukan permintaan agar dilakukan tindakan hukum atas aduan tersebut.

Setelah dilakukan observasi secara langsung ke Polres Kota Malang, Polres Kabupaten Malang dan Polres Kota Batu, didapatkan informasi bahwa rata-rata pengaduan yang diterima dari pelapor adalah terkait dengan produk Notaris yaitu Akta Otentik yang diduga merugikan pihak-pihak tertentu, yaitu terkait:

1. Pasal 266 KUHP

"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

2. Pasal 263 KUHP

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

⁵⁷ Ibid., hlm 108

⁵⁸ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 118.

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Apabila melihat kekuatan pembuktian akta otentik itu sendiri, yaitu kekuatan pembuktian formal, pada hakikatnya Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris memastikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Sehingga apabila keterangan para pihak merupakan keterangan yang tidak sebenarnya dan hal tersebut dituliskan didalam Akta Otentik atau Notaris dalam hal ini sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta otentik terkait berkas-berkas, identitas maupun tanda tangan para pihak, dan di kemudian hari terdapat pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya suatu akta tersebut karena dengan terbitnya suatu akta tersebut dapat mengakibatkan seseorang kehilangan haknya, hal tersebut yang mengakibatkan Notaris seringkali mendapat panggilan dari pihak Kepolisian untuk melakukan proses penyidikan. Beberapa di antaranya yaitu: ⁵⁹

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan, Notaris membuat akta padahal ia mengetahui bahwa para pihak tidak saling berhadapan;
2. Identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu.
3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga salah satu pihak dianggap memberikan keterangan palsu, Notaris menjadi pihak yang turut tergugat selaku pihak yang membuat akta perjanjian.
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga disini akta Notaris yang terbit dianggap akta palsu. Jerat yang biasa digunakan pelapor adalah memasukkan data palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan dokumen.

⁵⁹ Berdasarkan Wawancara langsung kepada Rudi KBO Polres Kab. Malang

5. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan, hal tersebut dilakukan biasanya dikarenakan keterbatasan waktu dan pihak yang bersangkutan tidak berada ditempat.
6. penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.
7. Terkait akta perjanjian jual beli yang mana tidak ada perjanjian perkawinan maka harus persetujuan suami/isteri penghadap. Tetapi pada saat menghadap kepada Notaris ternyata orang yang dibawa tersebut bukan suami/isteri penghadap.

Atas dasar laporan atau pengaduan tersebut diatas dari Pihak Pelapor yaitu pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya akta notaris tersebut, Pihak Kepolisian akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Rencana Tugas. Dalam tahapan penyelidikan, penyelidik akan mencari bukti apakah tindakan seperti yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur tindakan pidana atau tidak, salah satu upaya mencari bukti adalah dengan mengirimkan undangan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait termasuk Notaris yang dilaporkan untuk dilakukan wawancara. Undangan klarifikasi itu sendiri memang tidak diatur didalam KUHAP, sehingga apabila Notaris dan pihak-pihak terkait yang diundang tersebut berkenan untuk datang maka hal tersebut dapat mempermudah Penyelidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dalam undangan klarifikasi tidak terdapat kewajiban untuk Notaris atau pihak-pihak terkait untuk hadir, dan apabila Notaris dan pihak-pihak terkait tidak berkenan untuk hadir dalam undangan klarifikasi hal tersebut tidak menjadi masalah karena dalam undangan klarifikasi pihak yang bersangkutan bebas untuk datang atau tidak, tidak ada sanksi hukumnya untuk itu. Setelah dilakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersedia untuk hadir, Penyelidik akan

melakukan gelar perkara kembali atas dasar Surat Hasil Penyelidikan, dan apabila cukup bukti maka akan perkara tersebut akan naik ke tingkat atau proses selanjutnya yaitu Penyidikan. Untuk masuk ke tahap Penyidikan, perkara tersebut harus mempunyai cukup bukti, apabila tidak cukup bukti maka tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu Penyidikan. Seperti halnya Penyelidikan, Penyidikan dilakukan atas dasar :⁶⁰

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat Perintah Tugas;
- c. Laporan Hasil Penyelidikan
- d. Surat Perintah Penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan :

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar dapat dilakukan penangkapan.”

Alat bukti yang dimaksud, yaitu alat bukti yang sah yaitu dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁶¹

Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan, dan terbitnya Surat Perintah Penyidikan, untuk memulai proses Penyidikan harus adanya SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang mana SPDP memuat sekurang-kurangnya:⁶²

- a. Dasar penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;

⁶⁰ Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”)

⁶¹ Pasal 184 KUHP

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Jarwoto Penyidik Polresta Malang

- d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui);
dan
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Setelah membuat SPDP, penyelidikan dimulai dengan melakukan pemanggilan kepada pihak – pihak yang terkait, pemanggilan dalam Pasal 26 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 termasuk dalam salah satu upaya paksa untuk menghadirkan saksi atau tersangka. Sedangkan pengertian pemanggilan sendiri adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik kepada seseorang karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi.⁶³ Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap:

- a. Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Pemanggilan saksi harus dilakukan Penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun. Menentukan saksi dalam sebuah peristiwa pidana harus didahului dengan penelitian dan pertimbangan yang matang sesuai dengan urgensi pemeriksaan, dihubungkan dengan keluasan pengetahuan yang dimiliki saksi mengenai peristiwa pidana yang bersangkutan. Pasal 1 butir 26, menentukan kriteria seseorang yang dapat dipanggil sebagai saksi, yaitu:

- a. Seorang yang mendengar sendiri;
- b. Melihat sendiri;
- c. Mengalami sendiri peristiwa pidananya;

⁶³ Loc.cit., hlm. 141

- d. Orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

Setelah menentukan status pemanggilan sebagai saksi atau tersangka, selanjutnya supaya panggilan yang dilakukan aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan mengenai syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal 119 dan Pasal 227 KUHP⁶⁴ yaitu:

- a. Panggilan berbentuk "Surat Panggilan"
 Surat pemanggilan harus memuat alasan pemanggilan, dan menyebutkan sebagai apakah seseorang tersebut dipanggil, apakah sebagai tersangka, atau sebagai saksi atau sebagai ahli. Namun pada prakteknya, seringkali dalam surat panggilan tersebut tidak dicantumkan dengan status apa orang yang bersangkutan tersebut dipanggil dan surat panggilan harus ditandatangani pejabat penyidik.
- b. Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak, antara tanggal hari diterimanya surat panggilan, dengan hari tanggal orang yang dipanggil diharuskan memenuhi panggilan, harus ada tenggang waktu yang layak.⁶⁵

Dalam proses penyelidikan, penyelidik dapat mendapatkan bukti salah satunya adalah dengan memberikan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait, bukan dalam bentuk "panggilan" seperti dalam tingkat Penyidikan. Undangan klarifikasi tersebut bersifat wawancara yang mana tidak ada kewajiban para pihak untuk datang, karena tidak ada sanksi hukumnya untuk itu. Sedangkan Pemanggilan dalam tingkat Penyidikan, adalah salah satu bentuk upaya paksa yang harus dipenuhi untuk pihak-pihak yang mendapat surat panggilan dari

⁶⁴ Loc.cit.,.hlm.126

⁶⁵ Pasal 112 ayat (1) KUHP

Pihak Kepolisian, karena ada sanksi hukum atas tidak hadirnya pihak yang telah dilakukan pemanggilan oleh Penyidik. Namun dalam hal pihak yang terkait tersebut adalah Notaris, penyidik tidak dapat serta merta melakukan pemanggilan seperti pada umumnya, karena UUJN mengatur mengenai pemanggilan Notaris terkait minuta akta harus berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris, hal tersebut diatur dalam Pasal 66 ayat (1), oleh karena itu sebelum memberikan surat pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam tahap pemeriksaan penyidikan, yaitu setelah dibuatnya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) penyidik mengirimkan Berkas Permohonan Persetujuan Pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris, untuk Wilayah Malang Raya bekas permohonan tersebut dikirimkan ke Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa timur yang terletak di Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jarwoto selaku Penyidik Polres Kota Malang pengiriman berkas tersebut dilakukan sebelum dilakukannya pemanggilan melalui surat panggilan terhadap Notaris yang bersangkutan. Dengan adanya aturan baru dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dan Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 mengenai prosedur pemanggilan dan pemeriksaan Notaris, apabila Penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap pemanggilan tersangka maupun pemanggilan saksi, karena tidak ada penjelasan didalam UUJN maupun Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 mengenai status sebagai apa pemanggilan Notaris harus berdasarkan persetujuan MKN. Oleh karenanya terhadap status tersangka maupun saksi apabila penyidik memerlukan keterangan dari Notaris harus berdasar persetujuan MKN. Prosedurnya Penyidik harus mengirimkan berkas permohonan persetujuan kepada MKN dan menunggu jawaban dari pihak MKN yaitu berupa Surat Jawaban apakah permohonan penyidik untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam pemeriksaan disetujui atau tidak. Berkas Permohonan Persetujuan Pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan, dikirimkan kepada MKN dengan disertai kronologis Jangka waktu dari dikirimnya

berkas permohonan tersebut sampai mendapatkan jawaban berupa surat dari MKN berbeda-beda, Penyidik Polres Kota Malang mengatakan dari beberapa kali mengirimkan berkas permohonan kepada MKN, penyidik mendapatkan surat jawaban perlu menunggu kurang lebih sampai dengan 30 hari. Sedangkan Penyidik Polres Kabupaten Malang, penyidik mendapatkan jawaban kurang lebih 7 hari. Dari surat balasan MKN tersebut kepada Penyidik terdapat 2 macam jawaban, yaitu: ⁶⁶

1. MKN memberikan persetujuan untuk penyidik melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan; atau
2. MKN menolak atau tidak memberikan persetujuan untuk Penyidik melakukan pemanggilan dan menghadirkan Notaris untuk pemeriksaan, namun memberikan persetujuan untuk mengambil fotocopy Minuta Akta.

Terhadap persetujuan yang diberikan MKN kepada Penyidik untuk melakukan Pemanggilan kepada Notaris, langkah selanjutnya adalah mengirimkan surat panggilan sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai surat panggilan, dalam surat panggilan yang dibuat Penyidik kepada Notaris pada awalnya adalah dihadirkan sebagai statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan penyidikan, surat panggilan tersebut disertai dengan surat balasan dari MKN yang memberikan keterangan bahwa MKN memberikan persetujuan kepada penyidik untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk melakukan pemeriksaan pada tahap Penyidikan. Dan pada saat mendapatkan surat panggilan tersebut Notaris wajib hadir dalam pemeriksaan penyidikan, karena pemanggilan dalam tahap penyidikan merupakan salah satu upaya paksa yang mana pihak yang dilakukan pemanggilan tersebut dan sudah menerima surat panggilan tidak hadir, terdapat sanksi hukumnya. Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur mengenai sanksi

⁶⁶ Hasi Wawancara langsung dengan Bapak Jarwoto selaku Penyidik Polres Kota Malang

apabila yang dipanggil tidak hadir, yaitu disebutkan dalam Pasal 27 angka 5 dan angka 6 yang berbunyi: "dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua, apabila panggilan kedua tidak datang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa."

Pemanggilan dalam proses penyidikan dilakukan untuk diadakannya tahapan selanjutnya dalam penyidikan yaitu pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka yang telah dipanggil. Terhadap Notaris yang selama ini dipanggil oleh Penyidik adalah untuk menjalani proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan, yang mana Notaris dipanggil dengan statusnya sebagai saksi untuk diminta keterangan bagaimana keterlibatan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik, terhadap peristiwa pidana yang diadukan oleh Pelapor, apakah terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris atau tidak. Seperti contohnya pada kasus pemalsuan identitas para pihak, apakah ketika proses pembuatan akta Notaris yang bersangkutan meminta identitas para pihak, apakah pada saat menghadap para pihak semua hadir, apakah akta dibacakan dihadapan para pihak.

B. Pelaksanaan Pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 di Instansi Kepolisian Malang Raya

Sebelum terbit Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pemanggilan Notaris harus berdasarkan ijin MKNW, pelaksanaan pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta di Malang Raya sendiri, yaitu setelah adanya Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, dilakukan oleh Penyidik tanpa persetujuan siapapun. Kepolisian dalam hal ini Penyidik melaksanakan pemanggilan berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 112 KUHP, yang berbunyi;

"Polisi yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil saksi atau tersangka."

Dari segi Penyidik, tentu hal tersebut sangat memudahkannya untuk memperoleh keterangan dari Notaris secara langsung dan mempermudah Penyidik untuk mengungkap tersangka dalam dugaan sebuah tindak pidana, namun dalam segi Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik tidak adanya aturan yang mengatur bahwa pemanggilan Notaris terkait minuta akta harus berdasarkan persetujuan terlebih dahulu, tidak dapat dipungkiri hal tersebut mengganggu Notaris dalam melaksanakan jabatannya, bagaimana tidak, setelah persetujuan dibatalkan oleh Putusan MK semakin banyak Notaris mendapat panggilan dari pihak berwajib untuk memenuhi panggilan penyidikan yang mana sebagai warga negara Indonesia Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut. yang menghawatirkan dalam kondisi ini selain dapat mengganggu Notaris dalam melaksanakan jabatannya, Notarispun dilanda kebingungan ketika harus memberikan keterangan dalam proses penyidikan karena disisi lain Notaris juga mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan. Oleh karenanya, Menteri Hukum dan HAM merasa perlu memberikan perlindungan dalam bentuk persetujuan kembali dalam melakukan pemanggilan kepada Notaris terkait akta minuta yang dibuatnya.

Setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, mau tidak mau ketentuan dalam Pasal 66 UUJN yaitu mengenai Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta harus berdasarkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu, baik untuk kepentingan penyidikan maupun proses peradilan ketentuan tersebut sudah harus dilaksanakan. Di Malang sendiri, yang memiliki 3 wilayah yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu yang mana masing-masing wilayah tersebut memiliki Kantor Kepolisian masing-masing, yaitu :

1. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang;
2. Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Malang;
3. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Batu.

Dari ketiga Kantor Kepolisian tersebut yang terletak di Malang, semenjak berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, apakah penyidik di masing-masing Kantor Kepolisian tersebut sudah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 UUJN, yaitu pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta berdasarkan persetujuan MKN, ataukah masih berpedoman pada Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 yang mana tidak meghendaki adanya persetujuan? Berdasarkan hasil perolehan data dari masing-masing Kantor Kepolisian tersebut akan ditemukan jawaban mengenai bagaimana pelaksanaan pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 di Malang Raya. Berikut adalah data mengenai pemanggilan Notaris yang dilakukan Kantor Kepolisian Malang Raya dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 :

Tabel 2.1
Pemanggilan Notaris yang Berkaitan dengan Akta Minuta oleh
Kepolisian Resor Kota Malang

TAHUN	TAHUN	TAHUN
2016	2017	2018
Nihil	11x	16x

Tabel 2.2
Pemanggilan Notaris yang Berkaitan dengan Akta Minuta
oleh Kepolisian Resor Kabupaten Malang

TAHUN	TAHUN	TAHUN
2016	2017	2018
Nihil	3x	5x

Tabel 2.3
Pemanggilan Notaris yang Berkaitan dengan Akta
Minuta oleh Kepolisian Resor Kota Batu

TAHUN	TAHUN	TAHUN
2016	2017	2018
Nihil	17x	15x

Berdasarkan hasil perolehan data diatas, merupakan pemanggilan Notaris di kantor kepolisian Malang Raya atas pengaduan dari Pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya suatu akta Notaris yang berkaitan dengan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, yaitu dugaan pemalsuan dokumen syarat pembuatan akta otentik, salah satu contoh banyak laporan masuk di Kantor Kepolisian Malang Raya adalah adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih. Oleh karenanya, Pihak Kepolisian melakukan pemanggilan terhadap Notaris tersebut untuk dimintai keterangan, semua panggilan tersebut merupakan kedudukan Notaris sebagai saksi. Sehingga pemanggilan terhadap Notaris dalam hal ini adalah sebagai Notaris yang dalam jabatannya melakukan suatu dugaan tindak pidana berupa terkait akta yang dibuatnya.

Setelah berlakunya Peremenkumham yaitu pada tahun 2016 pelaksanaan pemanggilan Notaris sendiri oleh Kepolisian Malang Raya masih belum dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan persetujuan MKNW, Pihak MKNWilayah sendiri masih dalam tahap mensosialisasikan struktur organisasinya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Hingga tahun 2018, Penyidik Polres Kota, Kabupaten Malang dan Polresta Batu masih belum pernah menetapkan Notaris sebagai tersangka, walaupun kedudukannya sebagai saksi dalam pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta proses penyidikan harus tetap berdasarkan persetujuan dari MKN Wilayah. Pemanggilan Notaris yang

membutuhkan persetujuan MKNW Jatim adalah pemanggilan yang berkaitan dengan akta minuta seperti yang dituliskan dalam Pasal 66 UUJN, berkaitan dengan akta minuta tersebut dimaksudkan adalah segala dugaan tindak pidana yang ada berkaitan dengan pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris. Tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris diluar akta otentik, seperti contohnya Notaris terlibat pembunuhan, atau Notaris terlibat pencurian yang mana hal tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya maka pemanggilan Notaris oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan tidak memerlukan izin dari MKNW. Data diatas merupakan pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan jabatannya yaitu sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik, yang mana terhadap akta tersebut terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan sehingga Penyidik perlu melakukan pemanggilan untuk memperoleh keterangan. Terhadap data pemanggilan Notaris oleh Kepolisian dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu bahwa pemanggilan Notaris tersebut diatas sebagian telah dilaksanakan berpedoman dengan peraturan yang baru yaitu Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang mewajibkan kembali adanya persetujuan terlebih dahulu dari MKN apabila Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris terkait minuta akta. Namun penerapannya sendiri, Instansi Kepolisian Malang Raya belum sepenuhnya menerapkan ketentuan tersebut pada setiap pemanggilan terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta minuta untuk menjalani proses penyidikan, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa pelaksanaan pemanggilan Notaris terkait minuta akta pada awal tahun 2017 yang dilakukan tanpa persetujuan MKN terlebih dahulu.

Melalui wawancara dengan Penyidik dan Notaris yang bersangkutan berikut alasan yang diberikan mengapa pemanggilan

dilakukan tanpa persetujuan MKN :

1. Beberapa Notaris dengan sendirinya bersedia membuka diri untuk memberikan keterangan kepada Penyidik sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh MKN Wilayah;
2. Berdasarkan hasil kesepakatan diantara pihak Penyidik maupun Pihak Notaris tersebut.
3. Beberapa Notaris yang baru menjabat belum mengetahui prosedur apabila dilakukan panggilan oleh Penyidik.

Dengan kedua kondisi tersebut diatas yang membuat Penyidik merasa tidak perlu mengirim berkas Permohonan Persetujuan Pemanggilan Notaris kepada MKN Wilayah, karena Notaris telah bersedia memberikan keterangan tanpa adanya ijin terlebih dahulu. Terhadap Notaris yang tidak berkenan hadir dalam pemanggilan dari Pihak Penyidik untuk melakukan pemeriksaan, maka Penyidik akan mengirimkan berkas permohonan persetujuan pemanggilan Notaris yang bersangkutan kepada MKN untuk melakukan proses penyidikan dengan disertai Nama Notaris, alamat Kantor Notaris serta kronologis perkara yang disangkakan terdapat unsur perbuatan pidannya.

Berikut adalah data pemanggilan Notaris pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang menggunakan persetujuan MKN untuk pemanggilan Notaris.

Tabel 3.1
Data Pemanggilan Notaris dengan Persetujuan MKN Wilayah
Jawa Timur

Wilayah Kantor Kepolisian	Jumlah Pemanggilan 2016-2018	Disetujui	Ditolak
Polresta Malang	25 kali	5 kali	13 kali
Polres Kabupaten Malang	6 kali	1 kali	2 kali
Polresta Batu	25 kali	2 kali	15 kali

Dari perolehan data diatas, menunjukan bahwa berkas Permohonan Persetujuan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta yang dikirim Penyidik kepada MKN Wilayah Jawa Timur, MKN tidak selalu memberikan persetujuan dalam berkas permohonan persetujuan yang dimohonkan oleh Penyidik untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan. Dalam surat permohonan yang diajukan oleh Penyidik kepada MKN tersebut, Penyidik meminta permohonan kepada MKN seperti contoh dibawah ini :

Berkaitan dengan hal tersebut diatas (*kronologis yang dijelaskan Penyidik*) guna kepentingan penyelidikan perkara dimaksud, dimohon Ketua memberikan persetujuan kepada (*Notaris yang bersangkutan*) selaku Notaris dan PPAT untu memberikan keterangan terhadap produk yang telah dibuatnya yaitu (*menyebutkan Jenis akta, Nomor akta dan Tanggal akta*) serta memberikan foto copy minuta akta dimaksud.

Dan berikut contoh surat jawaban yang diberikan MKN Wilayah kepada Penyidik :

Dari hasil pemeriksaan dengan Notaris yang bersangkutan, Majelis Pemeriksa memutuskan :

1. **MENOLAK** terhadap permintaan panggilan kepada Notaris X untuk hadir dalam pemeriksaan; karena prosedur dan persyaratan dalam pelaksanaan jabatan Notaris yang bersangkutan telah sesuai dengan per-UU.
2. **MENYETUJUI** terhadap permintaan fotocopy Minuta Akta Nomor X Tanggal X yang dilegalisir Notaris yang bersangkutan.

tersebut diatas yang **MENOLAK** memberikan persetujuan untuk Notaris hadir dalam pemeriksaan, dan **MENYETUJUI** Penyidik untuk meminta *fotocopy* Minuta Akta yang diperkarakan tersebut tidak memberikan titik terang terhadap kebutuhan pemeriksaan di penyidikan, karena yang dibutuhkan Penyidik bukan akta minutanya melainkan keterangan yang jelas dari Notaris yang bersangkutan, apakah benar Notaris yang bersangkutan (ybs) pernah membuat Perjanjian Jual Beli seperti ini, apakah pada saat pembuatan akta para

pihak datang, apabila ada salah satu pihak tidak datang mengapa dalam akta dituliskan bahwa kedua belah pihak hadir, pertanyaan-pertanyaan seperti yang dibutuhkan oleh Penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta. Apakah terdapat keterlibatan Notaris sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila hanya disetujui untuk mengambil *fotocopy* Minuta Akta, Penyidik hanya bisa menarik kesimpulan apa yang dituliskan didalam akta, bukan keadaan sebenarnya seperti pada saat pembuatan akta. Dan yang paling penting adalah masing-masing orang mempunyai persepsi atau pemahaman yang berbeda terkait akta yang diberikan tersebut, sehingga tidak lahir keterangan yang memberikan kepastian hukum. Selain itu, alasan penolakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Brigadir Faris Tyas selaku Penyidik Polresta Batu, adalah sebagai berikut:

1. Kronologis yang disampaikan kurang lengkap dan jelas, sehingga permohonan ditolak oleh MKN Wilayah;
2. Secara administrasi, tidak ada kronologis yang dicantumkan dalam surat Permohonan Persetujuan Pemanggilan Notaris.

Pada intinya berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Instansi Kepolisian di Malang Raya, dalam melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk melakukan proses penyidikan terkait akta yang dibuatnya berpedoman pada ketentuan yang baru yaitu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, yaitu berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari MKN. Namun, dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut belum benar-benar ditegakkan karena Pada awal tahun 2017, terdapat beberapa panggilan Notaris yang dilakukan tanpa persetujuan MKN terlebih dahulu oleh Penyidik. Oleh karenanya untuk mengetahui mengapa ketentuan dalam Pasal 66 UUJN jo Pasal 24 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tersebut belum benar-benar ditegakkan, hal tersebut akan dijelaskan menggunakan Teori Penegakan Hukum dengan menguraikan faktor-faktor yang berkaitan dan mempengaruhi Penegakan Hukum, yaitu :

Faktor Hukum, atau substansi atau peraturan perundang-undangan disini yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016. Secara tegas dalam kedua aturan tersebut telah mengatur bahwa dengan dikeluarkannya Permenkumham pada tahun 2016, setiap pemanggilan yang melibatkan Notaris terkait Minuta Akta harus berdasarkan persetujuan dari MKN Wilayah hal tersebut berlaku pada semua penegakan hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Walaupun disini lain, Penyidik dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk memanggil siapapun untuk diminta keterangan apabila diduga melakukan tindak pidana, namun dengan terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Penyidik adalah salah satu pihak yang harus melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Instansi Kepolisian di Malang Raya, yaitu Polresta Malang, Polres Kabupaten Malang dan Polresta Batu dalam melaksanakan pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta setelah berlakunya Permenkumham pada tahun 2016, telah berpedoman pada ketentuan yang baru tersebut yaitu berdasarkan persetujuan MKN terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaannya beberapa panggilan pada awal tahun 2017 dilakukan tanpa persetujuan MKN, beberapa karena permintaan Notaris yang bersangkutan, dan beberapa atas kesepakatan antara Penyidik dan Notaris tersebut. Tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya aturan tersebut yaitu Pasal 66 ayat (1) UUJN jo Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, ternyata dalam kedua aturan tersebut tidak mengatur mengenai sanksi apabila Penegak Hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim maupun Notaris sebagai profesi yang dilindungi oleh MKN tidak melaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur.

Selain itu, dengan diterbitkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Menteri Hukum dan HAM berharap dapat memberikan perlindungan kepada Notaris, dan pada dasarnya dengan terbitnya peraturan tersebut tidak membuat sulit pihak-pihak yang mendukung terlaksananya peraturan tersebut, seperti Penyidik, Penuntut Umum

maupun Hakim, namun pada saat melaksanakan peraturan tersebut terdapat hal-hal yang kurang menunjang terlaksanakannya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, yaitu mengenai kebakuan format surat permohonan persetujuan, format BAP, dan surat balasan atau jawaban dari pihak MKN Wilayah yang belum diatur dengan jelas di dalam Permenkumham, sehingga seperti yang telah dijelaskan diatas banyak surat permohonan penyidik yang ditolak karena MKN Wilayah menilai kronologis kurang jelas dan lain-lain. MKN memberikan jawaban untuk melengkapi secara administrasi. Sehingga apabila keterangan dari Notaris sangat penting dalam proses penyidikan, maka penyidik akan mengirim ulang dengan melengkapi kronologis yang lebih lengkap, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jarwoto selaku Penyidik Polresta Malang mengatakan bahwa setelah melengkapi kronologis sesuai permintaan MKN Wilayah Jawa Timur, permohonan tersebut tetap ditolak dengan alasan lainnya.

Faktor Penegak Hukum, penegak hukum adalah pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakan aturan UUJN dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, yaitu Penyidik dan Notaris. Dalam proses penyidikan yang melibatkan Notaris sebagai saksi yang hendak dimintai keterangan, Penyidik mempunyai kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MKN, sebelum melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan, Penyidik wajib mengirimkan surat permohonan pemanggilan Notaris kepada MKN. Hal tersebut merupakan aturan baru yang harus dilakukan ketika penyidikan melibatkan Pejabat Umum yaitu Notaris, yang mana sebelumnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pemanggilan Notaris dilakukan tanpa persetujuan siapapun, dan hal tersebut lebih memudahkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

Oleh karenanya setelah berlakunya Permenkumham, proses penyidikan yang melibatkan Notaris sedikit lebih panjang prosedurnya, karena untuk memanggil Notaris, Penyidik membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 hari atau 1 bulan untuk mendapatkan jawaban

dari pihak MKN Wilayah, dan surat balasan dari MKN Wilayah pun belum tentu memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris dengan beberapa alasan yang telah disebutkan diatas, dengan kondisi tersebut memungkinkan Penyidik tidak melaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN jo Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 yaitu pemanggilan Notaris tidak berdasarkan persetujuan terlebih dahulu terlebih ketika Notaris yang bersangkutan bersedia memberikan keterangan tanpa disertai persetujuan dari MKN Wilayah. Hal tersebut yang menjadi alasan Penyidik tidak memerlukan persetujuan MKN karena Notaris secara kooperatif memenuhi panggilan pihak Kepolisian. Penegak Hukum disini selain Penyidik adalah Notaris, dengan dikeluarkannya aturan mengenai adanya "persetujuan" kembali dalam Pasal 66 ayat (1) setiap kali Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang diperkuat dengan terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, hal tersebut sebagai bentuk perlindungan yang diberikan untuk profesi Notaris. Namun tak banyak Notaris yang justru menganggap bahwa aturan tersebut memberatkan Notaris karna dengan adanya surat yang dikirim oleh Penyidik kepada MKN, Notaris wajib memenuhi panggilan dari MKN Wilayah untuk melaksanakan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, dalam hal ini Notaris yang berkedudukan di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu menjadi kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur yang terletak di Surabaya. Karena dirasa memberatkan tak jarang Notaris tersebut bersedia datang kepada Penyidik untuk memberikan keterangan tanpa adanya persetujuan dari MKN terlebih dahulu.

Faktor sarana dan fasilitas, Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Dalam hal ini adalah mengenai produk atau keputusan atau surat

jawaban yang dikeluarkan oleh pihak MKN Wilayah, kebanyakan surat jawaban yang diberikan MKN Wilayah berisi dua kemungkinan, yaitu :

- a) MENOLAK, terhadap permintaan pemanggilan terhadap Notaris X untuk hadir dalam pemeriksaan; karena prosedur dan persyaratan dalam pelaksanaan jabatan Notaris yang bersangkutan telah sesuai dengan per-UU
- b) MENYETUJUI, pengambilan fotocopy akta minuta

Dari kebanyakan surat permohonan yang dikirimkan Penyidik kepada MKN Wilayah untuk meminta ijin melakukan pemanggilan Notaris yang diduga terlibat tindak pidana terkait dengan akta yang dibuatnya, jawaban yang diberikan adalah MENOLAK terhadap permintaan pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan untuk hadir dalam pemeriksaan dengan menyebutkan alasan yang umum tidak secara spesifik yaitu "karena Notaris yang bersangkutan telah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai dengan UU", apabila MKN Wilayah tidak memberikan ijin kepada Penyidik untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris, biasanya MKN Wilayah akan memberikan ijin kepada Penyidik untuk meminta *fotocopy* Minuta Akta yang diduga terdapat unsur pidana didalamnya.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polresta Kota Malang, bahwa yang dibutuhkan Penyidik adalah keterangan dari Notaris tersebut untuk membuat terang suatu tindak pidana, selama ini proses Penyidikan dengan hanya menggunakan *fotocopy* akta minuta sebagai bukti, tidak membuat suatu tindak pidana tersebut menjadi jelas dan terang tanpa adanya keterangan secara langsung dari Pihak yang membuatnya yaitu Notaris. Justru Penyidik dibuat pusing dengan harus menerka-nerka apa yang dituliskan didalam akta tersebut, pada dasarnya Penyidik membutuhkan keterangan dari Notaris seperti apakah benar pada saat pembuatan akta, ada salah satu pihak yang tidak hadir, apakah pada saat para pihak menghadap Notaris meminta identitas asli para pihak dan lain lain. Namun pada kenyataanya, dengan hanya menggunakan *fotocopy* akta minuta Penyidik merasa

kesulitan untuk mengetahui bagaimana kondisi sesungguhnya ketika proses pembuatan akta, yang mana hal tersebut hanya bisa didapatkan dengan bertanya secara langsung kepada yang bersangkutan. Oleh karenanya surat jawaban yang diberikan kepada Penyidik juga menghambat atau membuat sulit proses Penyidikan, karena tidak mengandung kepastian hukum.

Faktor budaya, Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Terbitnya Permenkumham yang mana memberikan aturan yang baru setelah sebelumnya terkait pemanggilan Notaris dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pihak Kepolisian, karena tidak adanya aturan yang menhendaki adanya persetujuan terlebih dahulu untuk pemanggilan Notaris terkait minuta akta. Yang pasti sebelum terbitnya Permenkumham pada tahun 2016, ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN belum dapat dilaksanakan, sehingga setelah terbit putusan MK yaitu Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Kepolisian bebas untuk meminta keterangan kepada Notaris mengenai perkara yang menyangkut dirinya.

Namun, tidak adanya pengaturan tersebut membuat bingung Notaris, disatu sisi Notaris sebagai warga negara harus memenuhi panggilan ketika mendapat surat panggilan dari Penyidik, disatu sisi Notaris mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia jabatannya, karena dalam hal ini penyidik bukan termasuk para pihak dalam akta otentik. Sebagai Pejabat Umum pembuat akta otentik Menteri Hukum dan HAM merasa perlu melindungi profesi Notaris, yaitu melalui MKN Wilayah Notaris tidak perlu bingung lagi bagaimana menghadapi panggilan dari Pihak Kepolisian, karena MKN memberikan tolak ukur kapan Notaris dapat membuka rahasianya atau tidak. Walaupun sebelum muncul Permenkumham melancarkan proses penyidikan maupun proses peradilan, namun hal tersebut dapat menyesatkan Notaris terhadap ancaman pidana apabila Notaris membuka

keterangan yang menjadi rahasia jabatannya. Oleh karenanya Menteri Hukum dan HAM merasa perlu memberikan ketentuan mengenai persetujuan kembali, namun dengan tata kerja yang baru sehingga dengan munculnya Permenkumham ini dapat menjawab kebingungan Notaris namun tidak juga menyesatkan Pengak Hukum yang mana membutuhkan keterangan Notaris baik untuk proses Penyidikan maupun proses peradilan.

Yang dimaksud dengan faktor budaya disini adalah, dengan munculnya Permenkumham yang menghendaki adanya persetujuan kembali dalam pemanggilan Notaris pasti memicu adanya perubahan-perubahan baik yang dapat diterima maupun tidak dapat diterima khususnya oleh Penyidik, namun yang perlu diingat adalah perubahan tersebut diharapkan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu Notaris dan juga Penyidik.

C. Faktor – Faktor yang Menjadi Hambatan Pelaksanaan Pemanggilan Notaris setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 di Kepolisian Malang Raya.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 66 UUJN jo Pasal Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, terkait pemanggilan Notaris oleh Kepolisian dalam proses Penyidikan di Instansi Kepolisian Malang Raya :

1. Faktor Hukum atau substansi

Setelah Pasal 66 ayat (1) UUJN jo Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 dilaksanakan dalam proses Penyidikan beberapa hal yang menghambat terlaksananya aturan tersebut dengan baik didalam ruang lingkup Kepolisian khususnya Penyidikan, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa aturan yang tidak diatur didalam UUJN maupun Permenkumham sebagai peraturan pelaksana yang menyebabkan proses Penyidikan menjadi terhambat, yaitu :

- a) Tidak diatur mengenai kebakuan format surat permohonan, surat jawaban, maupun BAP.
- b) Tidak disebutkan dengan tegas, apa yang menjadi ruang lingkup kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan.

Nyatanya dengan tidak diaturnya kedua hal tersebut mengakibatkan beberapa surat permohonan Penyidik ditolak dengan berbagai alasan terkait dengan administrasi yaitu mengenai bentuk dan isi surat permohonan. Selain itu, beberapa surat permohonan yang ditolak dengan alasan bahwa apa yang dimohonkan terkait Notaris tersebut diluar kewenangan MKN. Selain itu, tidak adanya sanksi membuat Notaris tidak terlalu terikat dengan aturan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Notaris dan Penyidik, dari beberapa panggilan yang dilakukan tanpa menggunakan ijin dari MKN, sebagian adalah permintaan dari Notaris yang bersangkutan dan juga sebagian panggilan tanpa ijin MKN ketika Penyidik mengirimkan surat panggilan tanpa dilampirkan surat persetujuan dari MKN, Notaris tersebut bersedia hadir untuk memberi keterangan, kondisi tersebut yang membuat Penyidik tidak perlu susah-susah untuk mengirim ijin kepada MKN Wilayah, karena Notaris dengan sendirinya bersedia untuk hadir. Namun dalam pelaksanaannya yang terjadi ketika Penyidik tidak menggunakan persetujuan MKN Wilayah, dan keterangan Notaris tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk digunakan sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum di persidangan, apabila ada Pihak yang mempermasalahkan karena tidak adanya lampiran persetujuan dari MKN Wilayah, maka dianggap BAP tersebut cacat formil begitupula terhadap dakwaan penuntut umum yang dibuat berdasar BAP Penyidik akan dinyatakan cacat formil, sehingga hal tersebut dapat dijadikan "senjata" bagi pihak-pihak tertentu untuk membatalkan isi BAP Penyidik.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas disini adalah mengenai produk atau surat jawaban yang berisi keputusan dari Majelis Pemeriksa apakah memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk

melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan atau berisi penolakan pemanggilan Notaris, namun memberikan persetujuan untuk mengambil *fotocopy* akta minuta. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN jo Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, dalam proses Penyidikan di Malang Raya apabila hanya diijinkan untuk mengambil *fotocopy* minuta akta, selama ini tidak terlalu membantu atau membuat terang suatu tindak pidana. Justru Penyidik dibuat bingung apabila harus memahami setiap kata dalam akta karena itu bukan keahliannya.

D. Upaya Penyidik Malang Raya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016

Upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dengan adanya beberapa kendala atau hambatan seperti tersebut diatas dalam pelaksanaan pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, di wilayah Malang Raya adalah :

1. Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian apabila permohonan yang dikirimkan kepada MKN Wilayah ditolak dengan alasan terkait administrasi yaitu kurang jelasnya kronologis yang disertakan dalam surat permohonan, maka Penyidik akan melengkapi secara jelas dan mengirimkannya kembali, dan apabila masih saja ditolak dengan status Notaris sebagai saksi kunci maka tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan oleh Pihak Penyidik selain mengirimkan surat pemberhentian penyidikan kepada Pelapor karna tidak adanya cukup bukti yang didapatkan.
2. Setelah adanya kondisi dimana BAP Kepolisian dianggap cacat formil dan tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menuntut seseorang dikarenakan tidak melampirkan surat persetujuan dari MKN Wilayah ketika memuat keterangan dari Notaris, pada tahun 2018, walaupun Notaris yang bersangkutan pada saat undangan klarifikasi pada tingkat Penyelidikan memberikan konfirmasi bahwa

Notaris tersebut bersedia hadir tanpa persetujuan MKN, sebagian Penyidik memilih tetap mengirimkan surat permohonan kepada MKN Wilayah jika hendak memanggil Notaris untuk kepentingan Penyidikan, hal tersebut untuk menghindari terjadinya BAP yang cacat formil serta sebagai perlindungan dari pihak-pihak yang berniat

3. Upaya yang dilakukan apabila Penyidik hanya diberikan persetujuan untuk mengambil *fotocopy* akta minuta, mau tidak mau Penyidik hanya mengkira-kira apa yang mereka baca dalam Akta tersebut yang mana hasil yang mereka dapat kurang memberikan kepastian hukum, karena apa yang mereka uraikan belum tentu tepat.

4.2 Pelaksanaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur Sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris Terkait Minuta Akta Oleh Penyidik.

A. Proses Pemeriksaan Notaris yang dimohonkan oleh Penyidik untuk Memberi Keterangan dalam Proses Penyidikan oleh MKN Wilayah Jawa Timur

Setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang memberi ketentuan mengenai Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, berdasarkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, MKN terdiri dari :

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan
2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Kewenangan dalam hal pemberian persetujuan seperti yang diatur didalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, merupakan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 20 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, yaitu :

"Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada MKN Wilayah oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim;
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."

Sebelumnya kewenangan terkait pemberian persetujuan dalam pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim baik untuk proses penyidikan maupun proses peradilan merupakan kewenangan milik Majelis Pengawas Daerah atau MPD. Namun kewenangan tersebut telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa "berdasarkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya putusan MK tersebut pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta tidak memerlukan persetujuan siapapun. Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dapat dengan bebas memanggil Notaris untuk menjalani proses penyidikan maupun proses peradilan.

Pada tahun 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merasa perlu memberikan perlindungan kepada profesi Notaris, dengan beberapa pertimbangan maka terbitlah Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, agar ketentuan dalam Pasal 66 UUDN Nomor 2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan. Setelah terbit Permenkumham Nomor 7 tahun 2016, aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian, penuntut umum maupun hakim tidak bisa lagi asal melakukan pemanggilan terhadap Notaris, yang mana sebelum berlakunya Permenkumham, pemanggilan terhadap Notaris dapat dilakukan secara langsung kepada Notaris yang bersangkutan. Saat ini aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) untuk kepentingan

penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris, hal tersebut disampaikan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 mendefinisikan MKN itu sendiri sebagai :

“suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memeriksa persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Dalam peraturan tersebut yaitu Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, membedakan tugas dan kewenangan antara MKN Pusat dan MKN Wilayah, MKN Pusat bertugas melaksanakan pembinaan terhadap MKN Wilayah melalui fungsi pengawasannya. Sementara MKN wilayah melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana telah disebutkan diatas. Seperti halnya Pihak Kepolisian, terdapat prosedur Penyidikan dalam hal pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta, MKN pula mempunyai prosedur dalam hal menerima berkas permohonan persetujuan pemanggilan Notaris dari Penyidik sampai pada akhirnya terbit jawaban MKN terkait permohonan tersebut yaitu diberikan persetujuan atau penolakan. Berikut Prosedurnya :

Bagan 2.1

Prosedur Pemeriksaan Notaris oleh MKN Wilayah



Berawal dari laporan polisi mengenai adanya dugaan tindak pidana yang menyebabkan Notaris turut dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk melaksanakan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, dalam hal ini yang dipanggil adalah Notaris, penyidik mempunyai kewajiban mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan amanah dari UUJN dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, oleh karenanya sebelum dilakukan pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan, Penyidik wajib mengirim berkas Permohonan Persetujuan Pemanggilan Notaris kepada MKN Wilayah, yang mana permohonan tersebut diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim kepada Ketua MKN Wilayah, sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan untuk melakukan:⁶⁷

1. Pemeriksaan terhadap Notaris (termasuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris) untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris;
2. Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
3. Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;

Setelah menerima berkas permohonan persetujuan pemanggilan Notaris yang dikirimkan kepada MKN Wilayah, langkah selanjutnya adalah pemanggilan Notaris yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam Sidang Pemeriksaan di MKN. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua MKN Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota MKN Wilayah,

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Jiwa Mulya, S.H. selaku staff Menteri Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur bagian AHU yang juga sebagai anggota MKNW Jatim.

dalam Pasal 21 ayat (2) Peremenkumham Nomor 7 Tahun 2016 disebutkan :

"Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
2. 2 (dua) orang anggota."

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Terhadap Notaris yang dipanggil oleh Majelis Pemeriksa, dalam Pasal 24 ayat (5) menyatakan bahwa Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan, apabila Notaris yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim. Mekanisme pemanggilannya sendiri, Majelis Pemeriksa paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan mengirimkan surat pemanggilan yang telah ditandatangani oleh Ketua MKN Wilayah kepada Notaris yang bersangkutan. Dalam hal keadaan mendesak, dimungkinkan juga pemanggilan dilakukan melalui faks atau *email* yang selanjutnya tetap disusul dengan surat pemanggilan. Segera setelah dilakukannya pemanggilan, Majelis Pemeriksa menentukan waktu untuk diselenggarakannya sidang Pemeriksaan, sidang pemeriksaan wajib dihadiri oleh ketiga Majelis yang telah dibentuk (harus memenuhi ketiga unsur tersebut) apabila ada salah satu Majelis yang tidak bisa hadir maka sidang pemeriksaan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan harus dilakukan penundaan hingga ketiga Majelis tersebut dapat hadir lengkap dalam sidang pemeriksaan Notaris. Namun disatu sisi, bahwa Majelis Pemeriksa wajib segera memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila melampaui batas yang telah ditentukan, maka dianggap Majelis Pemeriksa atas persetujuan Ketua MKN Wilayah menerima permintaan persetujuan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

Setelah melakukan sidang pemeriksaan, Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan keterangan langsung yang diperoleh dari Notaris yang bersangkutan, yang mana keterangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jiwamulya Heri Pugu Putra, S.H. parameter Majelis Pemeriksa berdasarkan persetujuan Ketua MKN Wilayah Jawa Timur dalam memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap Notaris dilakukan dalam hal:⁶⁸

1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
5. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*)

Atas dasar tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berdasarkan persetujuan dari Ketua MKN Wilayah memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk melakukan:

1. Pemanggilan Notaris oleh kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim guna kepentingan pemeriksaan untuk proses peradilan;
2. Pengambilan fotocopy Minuta Akta dan/atau Surat-Surat dalam penyimpanan Notaris;
3. Pengambilan Minuta Akta atau Surat-Surat yang Dilekatkan Pada Minuta Akta.

⁶⁸ Pasal 26 dan 27 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016

Dan atas persetujuan MKN tersebut, Notaris yang bersangkutan wajib:

1. Datang untuk memenuhi panggilan guna kepentingan pemeriksaan oleh Penyidik baik dalam kedudukannya sebagai saksi maupun tersangka;
2. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim;
3. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁶⁹

Selain persetujuan, kemungkinan jawaban yang diberikan oleh MKN Wilayah terhadap berkas Permohonan Persetujuan Pemanggilan Notaris yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim ada jawaban Penolakan. Berdasarkan sidang yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan 2018, berikut ini adalah beberapa alasan penolakan MKN kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim:⁷⁰

1. Permohonan penyidik melampaui kewenangan MKN;
Contohnya: permohonan sita akta, permohonan pinjam pakai akta, dan permohonan terhadap akta PPAT)
2. Format permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016;
Dalam Pasal 23 ayat (3) dijelaskan, setidaknya surat permohonan memuat paling sedikit:
 - a. Nama Notaris;
 - b. Alamat Kantor Notaris;
 - c. Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

⁶⁹ Pasal 25 Huruf b Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

⁷⁰ Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jiwamulya Heri Puguh Putra, S.H. selaku staff Menteri Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur bagian AHU yang juga sebagai anggota MKNW Jatim.

- d. Pokok perkara yang disangkakan.
- 3. Pelaksanaan jabatan Notaris telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam UUJN;
- 4. Tidak ada keterkaitan antara tindak pidana dengan pelaksanaan jabatan Notaris yang bersangkutan;
- 5. Notaris tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan karena telah meninggal dunia, atau Notaris yang bersangkutan dalam kondisi sakit yang menyebabkan kesulitan untuk memberikan keterangan, misalnya terkena stroke.

Namun, biasanya penolakan tersebut tidak serta merta menolak apapun yang dimohonkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, biasanya penolakan tersebut dalam hal Notaris datang sebagai saksi dan memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan dalam penyidikan, namun dengan ditolaknya Notaris untuk hadir dalam penyidikan, MKN memberikan persetujuan untuk Penyidik mengambil fotokopi minuta sebagai pengganti keterangan dari Notaris, yang mana hal tersebut terdapat kelebihan serta kekurangan pastinya dalam kebutuhan penyidikan.

B. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Penyidik

Kantor Notaris yang berkedudukan di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur yang berpusat di Kota Surabaya, apabila terhadap Kantor Kepolisian Malang Raya, yaitu Polresta Malang, Polres Kabupaten Malang dan Kota yang hendak melakukan pemanggilan terhadap Notaris tersebut wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MKN Wilayah Jawa Timur. Sebelumnya pada UUJN sebelum perubahan yaitu Nomor 30 Tahun 2004 persetujuan terhadap pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai bagian dari Majelis Pengawas Notaris

(MPN), namun kewenangan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan pertimbangan hukum bahwa adanya persetujuan dalam pemanggilan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 yaitu mengenai prinsip persamaan dihadapan hukum, Namun pada tahun 2014 perubahan UUD Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pasal 66 ayat (1) UUD dengan diperkuat dengan terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, tetap menghendaki adanya persetujuan terhadap pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta yang mana terdapat peralihan kewenangan dari MPD ke MKN.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jiwa Bapak Jiwamulya Heri Pugu Putra, S.H. mengatakan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik tetap membutuhkan badan atau lembaga yang berperan dalam memutuskan apakah Notaris yang dimohonkan Penyidik untuk hadir dalam pemeriksaan Penyidikan perlu hadir atau cukup memberikan *fotocopy* minuta akta, berkenaan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia jabatan. Berikut uraian penjelasan pertimbangan Menteri Hukum dan HAM membentuk MKN dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris baik untuk prose penyidikan maupun proses peradilan:

Sumpah Hippocreates "segala sesuatu yang ku lihat dan kudengar dalam melakukan praktekku, akan aku simpan sebagai rahasia." Makna sumpah ini, menunjukkan kewajiban seseorang untuk merahasiakan yang melekat pada profesi atau jabatan tertentu dan sifat sumpah tersebut merupakan *self impose regulation* atau merupakan kewajiban moral untuk mentaatinya. Saat ini, sumpah jabatan/profesi bukan saja merupakan norma moral tetapi sudah berkembang menjadi norma hukum yang dapat dipaksakan dan bersanksi. Notaris sebagai pejabat umum, sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang berwenang, dan sumpah jabatan notaris ini, selain merupakan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga janji yang mengikat berdasarkan norma hukum publik. Kewajiban menjaga rahasia jabatan notaris, dirumuskan dalam

sumpah jabatannya dan ketentuan lain yang diatur secara hukum dalam UU Jabatan Notaris yaitu:

Pasal 4 ayat (1):

"Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk."

Pasal 4 ayat (2) (kutipan sebagian):

"saya bersumpah/berjanji: ...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya..."

Pasal 16 ayat (1) huruf f:

"Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain."

Pasal 54 ayat (1):

"Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan."

Konsep rahasia jabatan notaris menganut teori rahasia relatif atau nisbi, dalam arti rahasia jabatan notaris dapat dibuka (bersifat terbuka), jika ada kepentingan umum yang harus didahulukan atau adanya UU atau Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan pengecualian. Ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, melahirkan kewajiban Ingkar, yaitu kewajiban bagi notaris untuk tidak berbicara kepada siapapun mengenai isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, baik yang dimuat dalam akta atau yang tidak dimuat dalam akta, kecuali UU menentukan lain. Kewajiban ingkar ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat, di mana

terhadap pelanggarannya dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum publik, yaitu:

Pasal 322 ayat (1) KUHPidana:

“Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang ia wajib menyimpannya, oleh karena jabatan atau pekerjaan, baik yang sekerang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan.”

Ketentuan Pasal 322 KUHPidana tidak memerinci hal hal yang wajib dirahasiakan oleh penyimpan rahasia jabatan, siapa yang wajib menyimpan rahasia jabatan, untuk siapa rahasia jabatan disimpan dan hanya memberikan pembatasan bahwa yang harus disimpan adalah rahasia karena jabatannya, yang sekarang maupun yang dahulu. Berdasarkan sumpah jabatan notaris yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan Pasal 322 KUHPidana, maka lingkup rahasia jabatan notaris, meliputi:

1. Rahasia jabatan yang wajib disimpan ditujukan untuk pihak yang berkepentingan langsung pada akta, para ahli waris dan penerima haknya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 54 UU Jabatan Notaris
2. Ruang lingkup isi rahasia jabatan, mencakup isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya, yang dapat diartikan keterangan yang langsung digunakan dalam pembuatan akta dan juga keterangan yang tidak secara langsung digunakan dalam pembuatan akta. Hal ini disimpulkan dari rumusan dalam pasal 322 KUHPidana yang menyatakan “....rahasia karena jabatannya...” jo Pasal 4 ayat 2 UU Jabatan Notaris, yang menyatakan “...merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”

3. Subjek yang wajib menyimpan rahasia jabatan yaitu: Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris yang masih menjabat maupun yang tidak menjabat lagi. Hal ini disimpulkan dari rumusan kata kata dalam Pasal 322 KUHPidana yaitu ".....karena jabatannya, yang sekarang maupun yang dahulu." UU Jabatan Notaris, Pasal 16A ayat 2, memperluas subjek yang wajib merahasiakan termasuk Calon Notaris yang menjalankan magang

Kewajiban merahasiakan bagi Notaris, tidak bersifat tertutup, tetapi memberikan pengecualian untuk membuka rahasia jabatannya sepanjang ada alasan pembenaran untuk membuka rahasia jabatannya, yaitu:

1. Undang-Undang lain secara tegas memberikan pengecualian kepada notaris (subjek penyimpan rahasia jabatan), untuk membuka rahasia jabatannya;
2. Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, bagi Notaris (subjek penyimpan rahasia jabatan), untuk membuka rahasia jabatan, khusus dalam penegakan hukum pidana terhadap Notaris (lihat Pasal 66 ayat 1 UU Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris);
3. Persetujuan dari pemilik rahasia jabatan atau pihak yang berkepentingan dengan rahasia jabatannya, dan hal ini hanya berlaku diluar penegakan hukum pidana. Dasar hukumnya bahwa Pasal 322 KUHPidana merupakan delik aduan absolut, dimana rahasia jabatan disimpan untuk kepentingan pemilik rahasia jabatan yaitu para pihak, para ahli waris dan penerima haknya (lihat Pasal 54 UU Jabatan Notaris).

Atas dasar tersebut diatas, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdapat kekosongan hukum mengenai mekanisme untuk menggugurkan kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan guna pembuatan akta tersebut, oleh karena itu dalam UUJN Nomor 4 Tahun 2014 (setelah perubahan) mengatur kembali adanya persetujuan terlebih dahulu mengenai kepentingan pemanggilan Notaris terkait Akta Minuta oleh Penegak Hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, yaitu persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris yang mana ketentuan tersebut telah diperkuat dengan dibuatnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 oleh Menteri Hukum dan HAM agar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) tersebut dapat segera dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi Notaris.

Menteri Hukum dan HAM berharap dengan dibentuknya MKN Wilayah ini maka prinsip kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum akan terwujud dengan tidak mencederai prinsip kerahasiaan notaris.⁷¹ oleh karena itu, MKN dibentuk untuk memperbaiki cara kerja MPD yang sebelumnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kota Malang, bahwa pada saat persetujuan masih kewenangan dari MPD, jangka waktu dari mengirim surat sampai dengan mendapatkan balasan dari pihak MPD memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut karena tidak diaturnya batasan waktu kapan MPD sudah harus memberikan surat balasan terhadap surat permohonan persetujuan yang diajukan oleh Penyidik. Sehingga waktu yang dibutuhkan Penyidik untuk mendapat surat balasan pun tidak dapat ditentukan berapa lamanya, hal itu yang membuat proses penyidikan ataupun proses peradilan menjadi terhambat atau seperti yang disampaikan dalam pertimbangan MK yaitu melanggar independensi peradilan membuat

⁷¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jiwa Mulya selaku staff Menteri Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur bagian AHU yang juga sebagai anggota MKNW Jatim.

proses peradilan memakan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan MKN sebagai lembaga baru yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris menggantikan MPD, dalam permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 diatur mengenai batasan waktu MKN harus segera memberikan jawaban terhadap surat permohonan yang diajukan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.

“Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu terlampaui, dianggap MKN Wilayah menerima permintaan persetujuan.”

Dengan adanya aturan tersebut, memberikan kepastian kepada Pihak yang berkepentingan seperti halnya Penyidik, untuk dapat bertindak apabila permohonan yang diajukan kepada MKN melampaui batas seperti yang telah ditentukan. Berikut perbedaan tata kerja pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD dengan tata kerja pemeriksaan yang dilakukan oleh MKN :

Tabel 4.1
Perbedaan Kewenangan MKN dan MPD

Majelis Pengawas Daerah	Majelis Kehormatan Notaris
Tata kerja pemanggilan diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 24 Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004	Tata kerja pemanggilan diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 26 Permenkumham Nomor: 7 Tahun 2016
Permohonan atau laporan dilakukan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan atas perbuatan Notaris;	Permohonan diajukan oleh penyidik dan/atau pengadilan
Laporan masyarakat atau pihak tersebut tidak hanya terkait dengan pembuatan akta atau pelaksanaan jabatan Notaris namun juga dapat terkait	Permohonan terkait dengan pembuatan akta dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris;

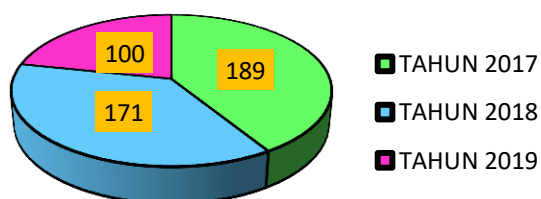
perilaku Notaris (ex: perselingkuhan, bicara kasar, dll.);	
Sidang pemeriksaan dilaksanakan dengan memanggil dan memeriksa Notaris sebagai terlapor dan pihak pelapor;	Tidak ada pembanding, hanya Notaris saja yang hadir dalam sidang pemeriksaan MKN
Pemeriksaan dilaksanakan berjenjang pada MPD dan MPW, sedangkan MPP berwenang dalam hal banding dan memberikan putusan dalam hal putusan tersebut atas rekomendasi dari MPW.	Pemeriksaan tidak berjenjang, MKN Wilayah memberikan jawaban kepada penyidik dan/atau pengadilan setelah sidang pemeriksaan dilaksanakan;

Apabila melihat beberapa perbedaan MPD dan MKN dalam melaksanakan kewenangannya, tata cara kerja MKN dibuat lebih sederhana atau lebih ringkas dibandingkan tata cara kerja MPD sebelumnya, hal tersebut untuk menghindari proses yang terlalu lama untuk memberikan jawaban atas surat permohonan yang telah dikirimkan oleh Penyidik.

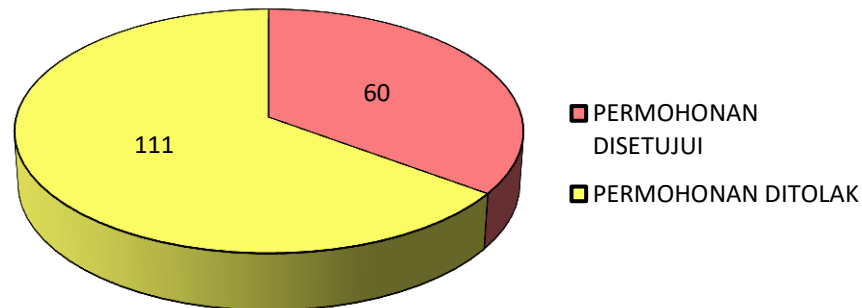
MKN Wilayah Jawa Timur sendiri, selama kurun waktu 2017-2019 telah menerima banyak permohonan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait Akta yang dibuatnya. Berikut adalah data laporan yang masuk ke MKN Wilayah Jawa Timur.

Tabel 5.1

**Data Permohonan
Pemeriksaan Notaris Oleh
MKN Wilayah Jawa Timur**



Tabel 5.2
Data Rekap Sidang MKNW Jawa Timur



Atas beberapa laporan tersebut, MKN Wilayah Jawa Timur telah berkali-kali menggelar sidang pemeriksaan atas permintaan Penyidik seluruh wilayah Jawa Timur, sebagian data diatas termasuk Notaris Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Pada tahun 2018 Bulan Mei MKN Wilayah menerima hingga 120 orang Notaris Jawa Timur yang diperiksa dan disidang oleh MKN Wilayah Jatim, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan Bulan Mei pada tahun 2017 lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak Notaris yang dilaporkan ke aparat penegak hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jiwamulya Heri Puguh Putra, S.H., bahwa mayoritas Notaris yang diperiksa adalah terkait dugaan pemalsuan bukti-bukti otentik. Maka dari itu Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik dalam melaksanakan jabatannya wajib bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kode etik yang ada, pasalnya Notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang mempunyai peran penting di kehidupan masyarakat. Dengan melihat data pemanggilan Notaris di MKN Wilayah Jatim per tahunnya masih dengan jumlah yang banyak, menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis, semakin mempertahankan hak-haknya dalam rangka memperoleh keadilan.

Namun dalam acara bertajuk "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN)" Dr. Mualimin Abdi selaku Ketua MKN Pusat mengatakan bahwa muncul fenomena yang akhir-akhir ini

muncul di kalangan Notaris, yaitu gejala dimana Notaris yang diijinkan oleh MKN Wilayah untuk diperiksa oleh Penyidik, justru mencurigai, melawan dan bahkan melakukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan selama ada MKN, Notaris diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu. Jika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka MKN tidak segan untuk melindungi Notaris. Oleh karenanya melalui wawancara dengan Bapak Jiwamulya Heri Puguh Putra, S.H., beliau berharap Notaris bisa berlaku kooperatif, jangan sampai mencurigai keberadaan MKN, apabila informasi yang diberikan benar maka akan mudah bagi MKN untuk melakukan pembelaan terhadap Notaris, karena dalam sidang pemeriksaan yang dilakukan MKN berbeda dengan MPD yang mana menghadirkan pelapor, Notaris yang bersangkutan serta pihak-pihak terkait, sedangkan sidang pemeriksaan MKN hanya menghadirkan Notaris yang bersangkutan, tidak ada pihak pembanding, oleh karenanya MKN Wilayah harus benar-benar memeriksa dengan benar agar hasil putusan atau surat jawaban yang dikirim kepada Penyidik tidak merugikan pihak manapun.

C. Faktor – Faktor yang Menjadi Hambatan dari Pelaksanaan Kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur

1. Melalui informasi dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, pada saat melaksanakan bimbingan teknis terkait layanan kenotariatan yang bertajuk "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris" dalam acara tersebut Ketua MKN Pusat⁷² membahas mengenai fenomena yang akhir-akhir ini muncul di kalangan Notaris. menurutnya ada gejala dimana Notaris yang diberikan persetujuan untuk diperiksa oleh Penyidik mencurigai, melawan dan bahkan menggugat jawaban dari MKN tersebut ke Pengadilan. Padahal hadirnya MKN bertujuan untuk melindungi profesi Notaris yang kerap kali mendapatkan panggilan dari Kepolisian terkait akta yang dibuatnya, dengan adanya MKN Notaris diberikan ruang

⁷² <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3729-ketua-mkn-percayalah-kami-akan-menjaga-marwah-dan-melindungi-notaris>

untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu, jika memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka MKN tidak segan untuk melindungi anggotanya, namun apabila memang ditemukan Notaris terdapat kaitannya dalam tindak pidana, MKN juga tidak boleh menghalang-halangi Notaris. Apabila banyak tuntutan ke pengadilan yang dilakukan Notaris kepada MKN, kemungkinan terburuk MKN akan bernasib sama dengan MPD yang dibatalkan melalui Putusan MK, Ketua Hukum dan HAM meminta Notaris untuk kooperatif dalam melaksanakan ketentuan yang ada dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, karena apabila tidak ada MKN, Penyidik akan semakin mudah memanggil Notaris dalam rangka penyidikan, tidak ada lagi mekanisme yang mengharuskan penyidik untuk melapor terlebih dahulu kepada MKN.

2. MKN Wilayah dalam melaksanakan sidang pemeriksaan berbeda dengan MPD yang sebelumnya juga berwenang dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta, dalam sidang pemeriksaan MKN Wilayah, tidak ada pihak pemanding seperti sidang yang dilaksanakan oleh MPD sebelumnya. Apabila MPD dalam sidang tersebut menghadirkan Notaris terlapor, pihak Pelapor dan pihak-pihak terkait dalam akta tersebut untuk memberikan keterangan. Sedangkan dalam sidang MKN Wilayah hanya menghadirkan Notaris, dalam hal ini MKN dalam memberikan putusan harus benar-benar memastikan bahwa apa yang dikatakan Notaris bukan keterangan yang di ada-ada. Sehingga hasil putusan tersebut tidak ada unsur keberpihakan, dan Penyidik yang menerima surat jawaban tersebut dapat diberikan alasan yang tepat dalam hal MKN menolak. Sehingga memberikan keadilan untuk pihak pelapor, Penyidik maupun Notaris yang bersangkutan.
3. Disatu sisi, ketika Penyidik telah melaksanakan sesuai prosedur, dan Notaris yang bersangkutan siap untuk hadir dalam sidang pemeriksaan di MKN Wilayah ketika menerima panggilan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jiwa bahwa karena

kesibukan masing-masing Majelis Pemeriksa yang memiliki pekerjaan utama diluar juga sebagai MKN, tak dapat dipungkiri bahwa sidang pemeriksaan dapat kemungkinan ditunda apabila anggota dari Majelis Pemeriksa yang berwenang memeriksa serta mengeluarkan persetujuan atau penolakan tersebut tidak hadir secara lengkap, karena untuk melaksanakan sidang tersebut diwajibkan untuk ketiga anggota Majelis Pemeriksa hadir dan memberi keputusan. Apabila tidak maka akan terjadi cacat prosedur. Kondisi yang seperti itu juga dapat dikatakan sebagai hambatan dalam terlaksananya suatu peraturan yang dimaksud.

4. Dalam wawancara bersama Bapak Jiwa, beliau mengatakan bahwa masih banyak Notaris yang belum terlalu memahami struktur kelembagaan MKN, sehingga beberapa Notaris belum mengetahui bagaimana proses yang harus dilalui ketika dipanggil atau dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana terkait minuta akta. Sebagai contoh Notaris baru yang berkedudukan di kabupaten Malang yang masih belum mengetahui keberadaan MKN itu sendiri.

D. Upaya yang Dilakukan Oleh MKN untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Kewenangan MKN sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik.

Sementara ini, MKN Pusat setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 masih terus melaksanakan penyempurnaan di beberapa sektor, MKN Pusat menyoroti dua peran penting dari MKN yaitu sampai sejauh mana MKN menjaga marwah dan Kehormatan Notaris serta sejauh mana MKN bisa memberikan perlindungan hukum terhadap anggotanya. Beberapa diselenggarakan sosialisasi mengenai struktur organisasi MKN yang dilakukan oleh MKN Wilayah di wilayah masing-masing untuk memberikan pengetahuan kepada Notaris, terutama pada Notaris baru bahwa keberadaan MKN sebagai badan yang melindungi profesinya tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

- A. Pelaksanaan pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan oleh Kepolisian setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 di Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, didapatkan bahwa Kepolisian Malang Raya dalam pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta telah berpedoman pada ketentuan Pasal 66 UUJN, sejak diterbitkannya Peraturan Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yaitu berdasarkan persetujuan MKN. Namun terkait pelaksanaannya di Malang Raya sendiri bahwa ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal, disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya di lingkup Kepolisian sebagai salah satu Penegak Hukum yang berkewajiban mematuhi aturan tersebut. Baik dari segi substansi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanggilan Notaris tersebut banyak hal yang belum diatur sehingga tidak memberikan kepastian hukum, serta tidak adanya aturan mengenai sanksi baik didalam UUJN ataupun Permenkumham apabila Notaris dan Penegak Hukum tidak melaksanakan ketentuan tersebut membuat adanya celah untuk pihak-pihak terkait tidak melaksanakan ketentuan yang ada.

- B. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur telah dilaksanakan dari awal terbitnya Peraturan Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, yaitu pada awal tahun 2016 dengan tahap awal mensosialisasikan keberadaan MKN sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi Notaris. Pelaksanaan kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur yang sesungguhnya dimulai pada awal tahun 2017 dengan banyaknya Notaris yang dilaporkan atas dugaan tindak pidana terkait Minuta Akta hingga tahun 2019, laporan atas Notaris masih banyak setiap tahunnya. Atas dasar permintaan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim, MKN Wilayah Jawa Timur telah melakukan berkali-kali

sidang pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Namun, tidak dipungkiri dalam melaksanakan kewenangannya tersebut MKN Wilayah Jawa Timur masih menemukan beberapa kendala atau hambatan sehingga pelaksanaan kewenangan MKN Wilayah kurang dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor hambatan tersebut, baik dari segi Penegak Hukum disini adalah Penyidik yang secara administrasi yaitu pada surat permohonan pemanggilan Notaris yang masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sehingga harus dikembalikan kepada Penyidik untuk melengkapinya, selain itu faktor utama yang mempengaruhi dan menunjang dilaksanakannya aturan tersebut adalah Notaris itu sendiri sebagai profesi yang dilindungi dengan dibentuknya MKN. Penegak hukum disini bukan hanya Kepolisian, tetapi Notaris juga sebagai pihak yang harus mematuhi permenkumham serta UUJN, kurang adanya kesadaran hukum untuk turut melaksanakan ketentuan dalam Permenkumham. Justru terdapat kasus Notaris menggugat surat jawaban dari MKN Wilayah, karena MKN Wilayah memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk memanggil Notaris untuk melaksanakan Penyidikan di Kepolisian.

5.2. SARAN

A. Bagi Menteri Hukum dan HAM

Saran yang diberikan dari hasil penelitian tesis ini adalah untuk Menteri Hukum dan HAM untuk lebih memperjelas aturan mengenai ketentuan pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh MKN, melengkapi beberapa aturan baik dalam UUJN maupun dalam Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menunjang pelaksanaannya terhadap pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakan aturan tersebut, dan tidak merugikan pihak manapun. Serta memberikan aturan mengenai sanksi agar suatu aturan tersebut mengikat khususnya bagi Notaris sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum Cet. 6**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Cholid Narbuko dan Abu Achamdi, **Metodologi Penelitian**, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Djoko Prakoso, **Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum**, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Habib Adjie, **Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Habib Adjie, **Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)**, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Habib Adjie, **Mengenal Notaris Syari'ah**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Hartono, **Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Lexy J. Moleong, **Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi**, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010.

Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana**, PT. Alumni, Bandung, 2007.

M. Husein Harun. **Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana**. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Munir Fuady, **Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)**, Alfabeta, Bandung, 2014.

Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2014.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, **Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

ARTIKEL/JURNAL/TESIS

Meyaty, **Kajian Yuridis Pencabutan Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012) Dan keluarnya UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 30/2004 Tentang Jabatan Notaris**, Sumatera Utara, Magister Kenotariatan, 2014.

Sudarto, **"Peranan Kejaksaan Dalam Penyidikan, Penuntut Dan Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sidang Pengadilan Negeri"**, Majalah Publikasi, Nomor 1, Penerbit Yayasan Lembaga Research Dan Afiliasi Industri Universitas Diponegoro, Semarang, 1962.

INTERNET

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=4193&bc= (diakses pada tanggal 03 Maret 2019, pukul 13.00 WIB)

<https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3729-ketua-mkn-percayalah-kami-akan-menjaga-marwah-dan-melindungi-notaris> (diakses pada tanggal 20 April 2019, pukul 14.14 WIB)